



REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI NASIONAL  

---

PENGURANGAN  
**RISIKO BENCANA**  
2006-2009



Dicetak oleh :  
Perum Percetakan Negara RI



Indonesia

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme - UNDP) adalah jaringan pembangunan global PBB yang menghubungkan keahlian dan pengetahuan untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pembangunannya membangun masa depan yang lebih baik. Di Indonesia, kami bekerja sebagai mitra yang dipercaya membantu pemerintah mencari jalan keluar dari tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP mendukung proses pembangunan di Indonesia melalui berbagai program pengentasan kemiskinan



REPUBLIK INDONESIA

# **RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2006-2009**

Kerjasama antara  
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
dengan  
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA

2006



---

# KATA PENGANTAR

Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi PBB No.63/1999 yang ditindaklanjuti dengan *Hyogo Framework for Action* dan *Beijing Action*. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan didukung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana alam, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana, menjadi suatu kegiatan yang bersifat *preventif*, sehingga bencana alam itu selain mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi atau malah ditiadakan.

Proses penyusunan buku ini telah berjalan sejak bulan Maret 2006 dengan melibatkan berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang meliputi departemen/lembaga terkait, perguruan tinggi, LSM, para donor dan pemerintah daerah. Kegiatan ini dimulai dengan pengumpulan berbagai rencana kegiatan dari semua pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan program yang terdapat dalam *Hyogo Framework for Action 2005-2015*.

Sebagai Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang pertama, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena baru bersifat mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai rencana kegiatan dari semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program pengurangan risiko bencana (PRB) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan buku ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

---

Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana ini, semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan dari RAN-PRB ini, komitmen dari semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan.

Jakarta, Desember 2006

Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Regional dan SDA  
Sebagai Ketua Tim Pelaksana Pokja Pengurangan  
Risiko Bencana dan Penanggulangan Konflik



Ikhwanuddin Mawardi



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## SAMBUTAN

Penyusunan Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan sebagai kelanjutan dari Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menjaga dan memperkuat realisasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung dan menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam *Hyogo Framework for Action 2005-2015* juga ditekankan bagi semua negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.

Bencana alam yang terjadi dua tahun terakhir ini, seperti gempa bumi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Alor, tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatra Utara, letusan Gunung Merapi dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tsunami di Pantai Selatan Jawa dan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga turut mendorong penyusunan rencana aksi ini.

Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah yang meliputi semua pemangku kepentingan. Proses ini harus dilakukan mengingat Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus supaya setiap yang terlibat merasa memilikinya sehingga akan menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 yang

diundangkan melalui Perpres No. 19 Tahun 2006, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana telah menjadi salah satu dari 9 prioritas Pembangunan Nasional. Hal ini selain untuk mendukung *Hyogo Framework for Action 2005-2015* yang ditindaklanjuti dengan *Beijing Action Plan* untuk Kawasan Asia, juga sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam mengatasi bencana alam yang lebih menekankan kepada kegiatan *preventif* melalui mitigasi dan pencegahan bencana dibandingkan dengan tindakan *responsif* berupa upaya tanggap darurat.

Rencana Aksi Nasional ini diharapkan menjadi langkah awal dan sekaligus mengakselerasi proses penyusunan dan penetapan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini sedang dibahas bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif.

Buku yang penyusunannya dikoordinasikan bersama Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) ini juga diharapkan menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana.

Jakarta, Desember 2006

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



H. Paskah Suzetta

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-3
1.3. Lingkup	I-3
<b>BAB II KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA</b>	<b>II-1</b>
2.1. Faktor-Faktor Penyebab Bencana	II-1
2.2. Ancaman Bencana di Indonesia	II-3
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami	II-4
2.2.2. Letusan Gunung Berapi	II-5
2.2.3. Banjir	II-6
2.2.4. Tanah Longsor	II-7
2.2.5. Kekeringan	II-7
2.2.6. Kebakaran Hutan dan Lahan	II-8
2.2.7. Epidem, Wabah dan Kejadian Luar Biasa	II-9
2.2.8. Kegagalan Teknologi	II-9
2.2.9. Kerusuhan Sosial	II-10
<b>BAB III LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>	<b>III-1</b>
3.1. Landasan Global	III-1
3.1.1. Resolusi PBB	III-1
3.1.2. Strategi Yokohama	III-3
3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo	III-4
3.2. Landasan Regional	III-5

---

3.2.1.	Rencana Aksi Beijing	III-6
3.3.	Landasan Nasional	III-6
3.3.1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	III-7
3.3.2.	Rencana Kerja Pemerintah	III-7
BAB IV RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA		IV-1
4.1.	Prioritas	IV-1
4.2.	Upaya dan Rencana Aksi	IV-2
BAB V PELAKSANAAN		V-1
5.1.	Mekanisme	V-1
5.2.	Kelembagaan	V-1
5.3.	Pendanaan	V-2
5.4.	Indikator	V-2
BAB VI PENUTUP		VI-1
LAMPIRAN (MATRIKS STATUS DAN RENCANA KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA)		

---

# DAFTAR SINGKATAN

ADPC	: Asian Disaster Preparedness Centre
AIDS	: Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APELL	: Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
AUSAID	: Australian Agency for International Development
AWS	: Automatic Weather Station
BAKORNAS PB	: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BANSOS	: Bantuan Sosial
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BGR	: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKRK	: Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas
BLS	: Basic Life Support
BMG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRR NAD	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam
BSB	: Brigade Siaga Bencana
CBDRM	: Community-Based Disaster Risk Management
CBFA	: Community-Based First Aid
CBRR	: Community-Based Risk Reduction
CLCC	: Creating Learning Communities for Children
CWSI	: Church World Service Indonesia
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DCSP	: Decentralized Conflict-Sensitive Planning

---

DESDM	: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
DEPDAG	: Departemen Perdagangan
DEPDAGRI	: Departemen Dalam Negeri
DEPDIKNAS	: Departemen Pendidikan Nasional
DEPHUB	: Departemen Perhubungan
DEPHUT	: Departemen Kehutanan
DEPKES	: Departemen Kesehatan
DEPKOMINFO	: Departemen Komunikasi dan Informatika
DEPKUMHAM	: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DEPPERIN	: Departemen Perindustrian
DEP. PU	: Departemen Pekerjaan Umum
DEPSOS	: Departemen Sosial
DEPTAN	: Departemen Pertanian
DIPECHO	: Disaster Preparedness European Commission of Humanitarian Aid Office
DISTAMBEN	: Dinas Pertambangan dan Energi
DITJEN	: Direktorat Jenderal
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKP	: Departemen Kelautan dan Perikanan
DMIS	: Disaster Management Information System
DMP	: Disaster Management Plan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRM	: Disaster Risk Management
DRR	: Disaster Risk Reduction
DUMPLAP	: Dapur Umum Lapangan
DVI	: Disaster Victim Identification
DVMBG	: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
ERTR	: Emergency Response and Transitional Recovery
FDRS	: Fire Danger Rating System
FKM	: Fakultas Kesehatan Masyarakat
GELS	: General Emergency Life Support
GIS	: Geographical Information System
GI-TEWS	: German-Indonesian Tsunami Early Warning System

---

GNRHL	: Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GPS	: Global Positioning System
GS	: Grand Strategy
GTZ	: Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit
HFA	: Hyogo Framework for Action
HIV	: Human Immuno-deficiency Virus
HIVOS	: Humanistic Institute for Development Cooperation
HOPE	: Hospital Preparedness of Emergency and Disaster
IDEP	: Indonesian Development of Education and Permaculture
IFRC	: International Federation of Red Cross
IFSAR	: Interferometric Synthetic Aperture Radar
IIDP	: Indonesian Institute for Disaster Preparedness
INGV	: Institute Nationale Geologie en Vulcalonogie
IOTWS	: Indian Ocean Tsunami Warning System
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISDR	: International Strategy for Disaster Reduction
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITS	: Institut Teknologi 10 November Surabaya
IUDMP	: Indonesian Urban Disaster Mitigation Program
JATENG	: Jawa Tengah
JATIM	: Jawa Timur
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JSPS	: Japan Society Program for Science
KALTIM	: Kalimantan Timur
KBBM	: Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat
KEMENEG LH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KEMENEG PP	: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KEMENKOKESRA	: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KFW	: Kerjasama Keuangan Jerman
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KOMPAK	: Kerjasama Organisasi Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan

---

KRB	: Kawasan Rawan Bencana
KSR	: Korps Sukarelawan Remaja
LAPAN	: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIMBAH B3	: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND	: Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDHF	: Mitigation of Disaster on Health Facility
MPBBM	: Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
MPBI	: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NGO	: Non-Government Organizations
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPM	: Norma, Standar, Pedoman dan Manual
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
NU	: Nahdlatul Ulama
OXFAM	: Oxford Committee for Famine Relief
PANSUS	: Panitia Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDA	: Peace Trough Development Analysis
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERTAMA	: Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat
PHAST	: Participatory Hygiene and Sanitation Approach
PIKUL	: Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal
PIRBA	: Pusat Informasi Riset Bencana Alam
PK-MKL	: Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMB	: Pusat Mitigasi Bencana

---

PMI	: Palang Merah Indonesia
PMR	: Palang Merah Remaja
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPGD	: Penanganan Penderita Gawat Darurat
PPK	: Pusat Penanggulangan Krisis
PRAMUKA	: Praja Muda Karana
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PROTAP PB	: Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
PRTMB	: Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana
PSC	: Public Safety Centre
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PVMBG	: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RAN-PRB	: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RISTEK	: Riset dan Teknologi
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRA	: Rapid Risk Assessment
RS	: Rumah Sakit
RUPUSDALOPS	: Ruang Pusat Pengendalian Operasi
RUU PB	: Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana
SAR	: Search And Rescue
SATGANA	: Satuan Siaga Bencana
SATGAS	: Satuan Tugas
SATKORLAK	: Satuan Koordinasi Pelaksana
SATLAK	: Satuan Pelaksana
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SIBAT	: Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat
SIPBI	: Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia
SKDPM	: Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular

---

SKPG	: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure
SUMBAR	: Sumatera Barat
SPGDT	: Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
TAGANA	: Taruna Siaga Bencana
TEWS	: Tsunami Early Warning System
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRC	: Tim Reaksi Cepat
TOT	: Training of Trainers
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNDP	: United Nations Development Programme
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UN ISDR	: United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNOCHA	: United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNSYIAH	: Universitas Syiah Kuala
UNTWG	: United Nations Technical Working Group
UPN	: Universitas Pendidikan Nasional
USA	: United States of America
USAID	: United States Agency for International Development
USGS	: United States Geological Survey
UU	: Undang-Undang
VCA	: Vulnerability and Capacity Assessments
VDAP	: Volcano Disaster Assistance Program
WFP	: World Food Programme
WHO	: World Health Organization





---

# PENDAHULUAN

# I

## 1.1. Latar Belakang

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan (decision makers).

Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor 63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi seperti diserukan oleh Resolusi PBB tersebut.

Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action) 2005-2015 juga menganjurkan seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga hal ini belum menjadi prioritas di Indonesia. Kelembagaan penanganan bencana yang ada belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN-PRB ini disusun secara nasional melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Proses ini dilaksanakan karena RAN-PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam implementasinya rencana ini akan disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko bencana pada tingkat regional dan internasional.

Masyarakat menduduki tempat penting dalam RAN-PRB karena masyarakat merupakan

subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Rencana aksi ini berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, mengingat banyaknya tradisi penanganan bencana yang telah ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan rencana aksi ini.

Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung setempat, sejauh memungkinkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana akan menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sumber dana, sumber daya alam, ketrampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

Walaupun disusun dalam kerangka nasional, implementasi RAN-PRB ini juga melibatkan para pelaku regional dan internasional. Kerjasama dalam pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara lintas wilayah karena pada hakekatnya bencana tidak terbatas oleh lingkup administratif atau kewilayahan tertentu. Kerjasama regional dan internasional merupakan salah satu wujud pengurangan risiko bencana yang bersifat lintas wilayah dan wujud solidaritas serta kebersamaan umat manusia.

Kesetiakawanan dan semangat kemanusiaan adalah modal dasar dalam upaya pengurangan resiko bencana. Terkait dengan itu, upaya-upaya pengurangan resiko bencana harus sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan internasional yang berlaku.

RAN-PRB merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional dan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian sudah semestinya apabila rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah maupun jangka panjang juga memperhatikan dan memuat pertimbangan akan risiko bencana yang ada di Indonesia.

RAN-PRB juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Ada tiga hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu:

1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko

- 
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah
  3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat

Mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga dari ancaman bencana, Indonesia perlu menyusun RAN-PRB yang partisipatif. Oleh karena itulah, Rencana Aksi ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga-lembaga internasional dan pihak terkait lain yang bergerak dalam penanganan kebencanaan.

RAN-PRB berisi gambaran kebencanaan di Indonesia termasuk faktor-faktor penyebab bencana dan kondisi bencana di Indonesia; landasan penyusunan rencana aksi baik landasan di tingkat internasional, regional maupun nasional; pengurangan risiko bencana nasional berupa prioritas, upaya dan rencana aksi; dan sebagai pelengkap dicantumkan pula mekanisme dan sumber pendanaan bagi pelaksanaan RAN-PRB.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi ini disusun dengan landasan kuat dan sistematis sebagai pedoman dan informasi bagi para pengambil keputusan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga sasaran dokumen ini lebih pada pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah dan terpadu.

## 1.3. Lingkup

RAN-PRB merupakan dokumen nasional yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana. Dokumen ini mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi sebagaimana telah dibakukan dalam kesepakatan Kerangka Aksi Hyogo.



---

# KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA

## II

Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti keragaman sosial, budaya dan politik.

### 2.1. Faktor-faktor Penyebab Bencana

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- (a) Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*)
- (b) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
- (c) Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara

yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600-2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya.

Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusaha

---

sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilitasi manusia yang semakin tinggi.

Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional.

## 2.2. Ancaman Bencana di Indonesia

Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data bencana dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari total bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi adalah banjir (34,1 persen dari total kejadian bencana di Indonesia) diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Meskipun frekuensi kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi) hanya 6,4 persen, bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat gempa bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut pada tanggal 28 Maret 2005.

---

### 2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami

Gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia akibat interaksi lempeng tektonik dan letusan gunung berapi. Interaksi lempeng tektonik banyak terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera yang merupakan pertemuan lempeng Benua Asia dan Samudera Hindia; wilayah selatan Pulau Jawa dan pulau-pulau di Nusa Tenggara yang merupakan pertemuan lempeng Benua Australia dan Asia; serta di kawasan Sulawesi dan Maluku yang merupakan efek dari pertemuan lempeng Benua Asia dengan Samudera Pasifik. Kondisi ini membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa dan ratusan gunung berapi yang rawan bencana di Indonesia.

Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami (gelombang laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti deformasi bawah laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera dan di pantai utara Papua. Sementara itu letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang seperti yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau.

Bencana gempa bumi dan tsunami umumnya menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa dalam skala besar dan butuh waktu yang lama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini cukup memprihatinkan karena peristiwa yang terjadi dalam waktu yang relatif cukup singkat dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur yang merupakan hasil pembangunan selama puluhan tahun.

Tsunami yang menimbulkan kerusakan terbesar dan terluas dalam sejarah dunia terjadi di kawasan Samudera Hindia akibat gempa bumi 8,9 Skala Richter di sekitar Pulau Simeuleu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami ini meluluhlantakkan Kota Banda Aceh, pantai Barat Provinsi NAD serta Pulau Nias. Pengaruh dan kerusakan juga dialami negara-negara di Kawasan Samudera Hindia seperti Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar, Sri Lanka bahkan sampai pantai Afrika Timur. Untuk Provinsi NAD dan Pulau Nias (Sumatera Utara) korban meninggal mencapai 165.862 (termasuk 37.066 orang yang dinyatakan hilang). Total kerugian ditaksir mencapai 41 Trilyun Rupiah, belum termasuk kerugian tidak langsung seperti gangguan pada proses produksi dan perekonomian masyarakat.

Gempa Bumi besar melanda Pulau Nias hanya berselang sekitar 3 bulan setelah dilanda tsunami yaitu pada tanggal 28 Maret 2005. Gempa berkekuatan 8,2 Skala Richter yang

---

terjadi di laut sekitar Pulau Nias ini tidak menimbulkan tsunami tetapi menyebabkan kerusakan yang luas di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simeulue (Provinsi NAD). Korban jiwa di kedua provinsi tersebut tercatat 915 orang dan sebagian besar dari Pulau Nias. Dampak lain gempa ini adalah terjadinya penurunan tanah di Kota Singkil.

Gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan pusat gempa di Selatan Kota Yogyakarta/Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan korban meninggal lebih dari 5.749 jiwa dan korban luka-luka 38.568 orang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal (Data BAKORNAS PB per tanggal 15 Juni 2006). Kerugian total akibat bencana ini diperkirakan sekitar Rp. 29,2 Triliun (BAPPENAS, 2006).

### 2.2.2. Letusan Gunung Berapi

Sampai saat ini terdapat 129 gunung berapi yang masih aktif dan 500 tidak aktif di Indonesia. Gunung berapi aktif yang ada di Indonesia merupakan 13 persen dari seluruh gunung berapi aktif di dunia, 70 gunung di antaranya merupakan gunung berapi aktif yang rawan meletus dan 15 gunung berapi kritis.

Gunung berapi ini membentuk sabuk memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara pada satu rangkaian dan menerus ke arah utara sampai Laut Banda dan bagian utara Pulau Sulawesi. Panjang rangkaian ini mencapai kurang lebih 7.000 kilometer dan di dalamnya terdapat gunung berapi dengan karakter beragam. Saat ini lebih dari 10 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan rawan bencana gunung berapi. Selama 100 tahun terakhir lebih dari 175 ribu jiwa manusia menjadi korban letusan gunung berapi.

Indonesia berada di daerah beriklim tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau. Di samping bahaya letusan langsung berupa muntahan dan jatuhnya material-material atau gas beracun, dalam musim penghujan gunung berapi dapat menimbulkan bahaya tidak langsung berupa aliran lahar atau perpindahan material vulkanik yang membahayakan.

Salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia adalah Gunung Merapi. Gunung

Merapi ini memiliki karakteristik erupsi berupa runtuhnya kubah lava yang menyebabkan bahaya aliran awan panas yang sering disebut "wedhus gembel". Kejadian runtuhnya kubah lava ini dapat berlangsung berulang kali dalam periode yang cukup panjang sampai beberapa bulan, sehingga perlu diamati dengan teliti dan terus-menerus, baik melalui pengamatan visual maupun telemetri dengan pengukuran kegempaan. Sebagai ilustrasi, sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 21 Juni 2006, Gunung Merapi masih dalam kondisi AWAS dan belum menunjukkan penurunan aktivitas yang berarti. Kejadian guguran awan panas terjadi ratusan kali dengan jarak luncuran mencapai 6 kilometer dan mengancam permukiman penduduk terutama di Kabupaten Sleman (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Klaten dan Magelang (Jawa Tengah). Penduduk yang diungsikan lebih dari 17.212 jiwa dengan korban meninggal 2 orang akibat terperangkap dalam bunker penyelamatan di Kaliadem, Cangkringan Kabupaten Sleman (Data Posko BAKORNAS PB per tanggal 15 Juni 2006).

### 2.2.3. Banjir

Banjir merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir di antaranya. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat yang menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Timur. Populasi penduduk Indonesia yang semakin padat yang dengan sendirinya membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin meningkat secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai. Penebangan hutan juga menyebabkan peningkatan aliran air (*run off*) yang dapat menimbulkan banjir bandang seperti yang terjadi di Kecamatan Bahorok dan Langkat (Sumatera Utara) pada tahun 2003, Kecamatan Ayah di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Aceh Tamiang pada akhir tahun 2006 yang juga memakan banyak korban jiwa dan kerugian harta.

Selama tahun 2006 telah terjadi beberapa bencana besar seperti tanah longsor dan banjir bandang di Jawa Timur di daerah Jember yang menyebabkan 92 orang meninggal dan 8.861 orang mengungsi serta daerah Trenggalek yang menyebabkan 18 orang

---

meninggal. Di Manado (Provinsi Sulawesi Utara) juga terjadi banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan 27 orang meninggal dengan jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 200 orang meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang (data BAKORNAS PB, 23 Juni 2006).

#### 2.2.4. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di Indonesia banyak terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan lereng tinggi. Bencana ini umumnya terjadi pada saat curah hujan tinggi. Berdasarkan catatan kejadian bencana, daerah yang sangat rawan terjadi bencana longsor adalah sepanjang pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan di Jawa dan Sulawesi dan di Nusa Tenggara. Longsor yang menimbulkan korban juga terkadang terjadi di terowongan atau sumur pengeboran di areal pertambangan. Tanah longsor juga terjadi setiap tahun terutama di daerah-daerah yang tanahnya tidak stabil seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor karena tingkat pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan komposisi tanah secara fisik didominasi oleh material lepas dan berlapis serta potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga yang ada di Indonesia. Karena banyaknya penebangan di hutan penyangga, wilayah rawan bencana longsor di Indonesia semakin bertambah. Sebagai contoh, Jawa Barat pada tahun 1990 masih memiliki hutan seluas 791.519 hektar (sekitar 22 persen dari seluruh luas provinsi ini), tetapi pada tahun 2002 tercatat tinggal 323.802 hektar (sekitar 9 persen dari luas seluruh Jawa Barat). Tidak mengherankan bila di provinsi ini banyak terjadi bencana longsor.

Tanah longsor di Banjarnegara (Jawa Tengah) pada awal tahun 2006 telah menyebabkan 76 orang meninggal dan 44 hilang tertimbun tanah. Bencana ini juga membuat 104 rumah rusak berat dan menghancurkan areal persawahan.

#### 2.2.5. Kekeringan

Berbeda dengan banjir dan tanah longsor yang terjadi pada musim hujan, pada musim

kemarau wilayah-wilayah di Indonesia terancam bencana kekeringan. Bencana ini menjadi permasalahan serius jika menimpa daerah-daerah produsen tanaman pangan seperti pernah terjadi di Bojonegoro di mana akibat kekeringan sawah seluas kurang lebih 1.000 hektar tidak memperoleh pasokan air sehingga gagal panen. Hal serupa juga terjadi di daerah Pantai Utara Jawa, di mana kekeringan menimpa daerah produksi pangan seluas kurang lebih 12.985 hektar.

Dewasa ini kekeringan juga menyebabkan permasalahan pada penyediaan energi di Indonesia karena menurunnya energi yang bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menyangga penyediaan energi listrik terutama di wilayah Jawa-Bali. Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau panjang di daerah-daerah tertentu terutama di Kawasan Timur Indonesia seperti NTB, NTT serta beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Selain menyebabkan bencana-bencana seperti disebutkan di atas, kekeringan juga potensial menyebabkan peningkatan jumlah penderita penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah.

#### 2.2.6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk bencana yang semakin sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan masyarakat dan terganggunya transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara. Kebakaran hutan yang cukup besar terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan tahun 2006 di Pulau Kalimantan dan sebagian Sumatera. Asap yang ditimbulkan bahkan meluas sampai ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kondisi litologi daratan Kalimantan dan Sumatera yang terbakar pada umumnya mengandung gambut. Gambut menjadi mudah terbakar akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali.

Data dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun sejak 1998 hingga 2002 tercatat berkisar antara 3 ribu hektar sampai 515 ribu hektar.

---

Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan lebih diperparah lagi oleh banyaknya pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan yang melakukan penebangan kayu tanpa mengindahkan peraturan dan lingkungan.

### 2.2.7. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa

Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit dan korban jiwa. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia dan sampai sekarang masih harus terus diwaspadai antara lain demam berdarah, malaria, flu burung, anthraks, busung lapar dan HIV/AIDS. Wabah penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya, sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya bencana ini.

### 2.2.8. Kegagalan Teknologi

Gagalnya sebuah sistem teknologi yang mengakibatkan terjadinya malapetaka teknologi (*technological disaster*) selalu bersumber pada kesalahan sistem (*system error*) yang bersumber pada desain sistem yang tidak sesuai dengan kondisi di mana sistem itu bekerja. Hal ini terjadi karena perancangan sistem yang gagal mempertemukan sistem teknis dan sistem sosial. Hal yang demikian sering terjadi di Indonesia dan menjadi bencana yang mengakibatkan kerugian jiwa seperti kecelakaan transportasi (kapal laut, pesawat udara dan kereta api), kecelakaan industri (kebocoran gas, keracunan dan pencemaran lingkungan) dan kecelakaan rumah tangga (hubungan arus pendek listrik dan kebakaran). Kegagalan teknologi transgenik juga merupakan salah satu ancaman

---

potensi terkait dengan posisi Indonesia sebagai pasar yang terbuka terhadap produk-produk transgenik.

Kecelakaan transportasi merupakan bencana kegagalan teknologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan setiap tahun tercatat rata-rata 30.000 nyawa melayang karena bencana ini. Dengan angka ini Indonesia menempati peringkat ketiga di ASEAN.

Salah satu bencana kegagalan teknologi yang saat ini sedang berlangsung adalah terjadinya semburan liar (*blow out*) sumur eksplorasi minyak di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Semburan lumpur panas dari perut bumi ini akibat tidak terprediksinya karakteristik lapisan batuan yang mengandung tekanan tinggi sehingga lumpur bercampur air terus-menerus keluar ke permukaan bumi sehingga menenggelamkan perumahan, lahan usaha, sawah dan ladang milik penduduk. Lumpur ini juga mengakibatkan timbulnya gangguan pada distribusi barang industri akibat tutupnya pabrik yang berada di sekitar lokasi kejadian dan terganggunya lalu lintas jalan tol Surabaya-Gempol. Jika kecelakaan industri ini tidak dapat segera diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kerugian serta kerusakan lingkungan yang lebih besar.

### 2.2.9. Kerusuhan Sosial

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, golongan, bahasa, agama dan etnis merupakan salah satu aset nasional yang bernilai tinggi sekaligus merupakan kondisi yang sangat rawan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memulai terjadinya konflik. Kerawanan terhadap konflik dalam masyarakat Indonesia diperburuk dengan tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini juga terkait dengan menurunnya rasa nasionalisme dalam masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Sejak awal tahun 1999 sampai beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah di Indonesia yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan sosial, misalnya di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Kabupaten Poso (Provinsi Sulawesi Tengah) dan berbagai daerah lainnya. Kerusuhan sosial ini telah mengakibatkan lebih

---

dari 1 juta jiwa orang di 20 provinsi terpaksa meninggalkan kediamannya. Meskipun saat ini masalah pengungsi sebagian besar telah teratasi, potensi berulangnya bencana ini akibat konflik sosial baru bisa sewaktu-waktu terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan perlu untuk dapat mengurangi terjadinya risiko tersebut.



---

# LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

## III

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat global dan regional. Beberapa forum internasional telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang melandasi upaya pengurangan risiko bencana di tingkat nasional. Agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia perlu didukung dengan landasan yang kuat dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 3.1. Landasan Global

Kesadaran untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup internasional merupakan tonggak awal sekaligus landasan bagi pelaksanaan upaya sejenis pada lingkup yang lebih kecil. Di tingkat internasional upaya pengurangan risiko bencana dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui beberapa Resolusi yang menyerukan kepada dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan.

#### 3.1.1. Resolusi PBB

Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana dimulai dengan dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971. Resolusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Resolusi Nomor 46/182 tahun 1991 mengenai Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana.

Pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi nomor 63 tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam resolusi

ini Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan-kegiatan PBB dalam pengurangan risiko bencana yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi-lembaga-organisasi. Strategi pengurangan risiko bencana mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah sampai jangka panjang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama ISDR adalah untuk: (1) mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi dan lingkungan; (2) mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan melakukan penggabungan strategi pencegahan risiko ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam, teknologi, lingkungan dan bencana sosial
2. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana terhadap manusia, kehidupan manusia, infrastruktur sosial dan ekonomi serta sumber daya lingkungan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan upaya pengurangan risiko bencana
4. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana

Tujuan-tujuan di atas diharapkan dapat menjadi kerangka upaya pengurangan risiko bencana pada semua tingkatan baik untuk kepentingan lokal, nasional, regional dan internasional.

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 63 tahun 1999 ditindaklanjuti oleh Majelis Umum dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 56/195 tanggal 21 Desember 2001 yang menetapkan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dalam usaha mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan pengurangan risiko bencana menjadi agenda tahunan negara-negara peratifikasi resolusi.

---

### 3.1.2. Strategi Yokohama

Strategi Yokohama ditetapkan pada tahun 1994. Dokumen ini merupakan panduan internasional bagi upaya pengurangan risiko dan dampak bencana. Strategi Yokohama menitikberatkan pada upaya untuk melakukan kegiatan yang sistematis untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, Strategi Yokohama juga menganjurkan dilaksanakannya upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan informasi, motivasi dan melibatkan masyarakat dalam segala aspek pengurangan risiko bencana. Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan pengalokasian dana khusus dalam anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan dari upaya pengurangan risiko bencana. Mekanisme anggaran dilakukan pada tingkat nasional, regional maupun dalam konteks kerjasama internasional.

Beberapa isu dan tantangan yang teridentifikasi dalam Strategi Yokohama antara lain:

1. Tata pemerintahan, organisasi, hukum dan kerangka kebijakan
2. Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini
3. Pengetahuan dan pendidikan
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Persiapan tanggap darurat dan pemulihan yang efektif

Kelima aspek di atas merupakan kunci dasar pengembangan kerangka rencana aksi pengurangan risiko bencana. Aspek-aspek tersebut dijabarkan melalui prinsip-prinsip dasar dalam upaya pengurangan risiko bencana, antara lain:

1. Pengkajian risiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk penerapan kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana yang efektif
2. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi kebutuhan tanggap bencana
3. Pencegahan bencana dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari kebijakan pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan internasional
4. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Bencana Alam Internasional
5. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah faktor

- kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
6. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan internasional
  7. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan pola pembangunan yang difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat
  8. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana, dan hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama teknik
  9. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana alam
  10. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Masyarakat internasional harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengerahkan sumber daya yang ada secara optimal dan efisien termasuk dalam hal pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengurangan risiko bencana yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang

### 3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo

Dengan memperhatikan beberapa aspek upaya pengurangan risiko bencana, Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (*World Conference on Disaster Reduction*) yang diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2005 di Kobe, menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, sosial, ekonomi dan lingkungan. Substansi dasar tersebut perlu menjadi komitmen pemerintah, organisasi-organisasi regional dan internasional, masyarakat, swasta, akademisi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan substansi dasar tersebut antara lain:

1. Memasukkan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, persiapan dan pengurangan kerentanan bencana
2. Pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara sistematis

- 
3. Kerjasama yang sistematis dalam pengurangan risiko bencana, pelaksanaan kesiapsiagaan darurat dan program pemulihan dalam rangka rekonstruksi bagi masyarakat terkena dampak bencana

Substansi dasar yang selanjutnya merupakan prioritas kegiatan untuk tahun 2005-2015 antara lain:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif

Tindak lanjut dari Kerangka Aksi Hyogo ini telah dilakukan di beberapa negara dan kawasan di antaranya di kawasan negara-negara Kepulauan Pasifik yang telah menetapkan *Framework for Action 2005-2015: An Investment for Sustainable Development in Pacific Island Countries*; kawasan Afrika membentuk *Africa Advisory Group on Disaster Risk Reduction* dan menetapkan *African Regional Platform of National Platform for Disaster Risk Reduction*; dan di kawasan Asia telah disepakati dokumen *Beijing Declaration on the 2005 World Conference on Disaster Reduction*. Pada lingkup negara-negara ASEAN telah disepakati *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response*.

### 3.2. Landasan Regional

Landasan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat internasional telah memberi dasar bagi upaya sejenis di tingkat regional. Di kawasan Asia-Pasifik, beberapa forum telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan rencana pengurangan risiko bencana pada lingkup nasional dan lokal.

### 3.2.1. Rencana Aksi Beijing

Rencana Aksi Beijing (*Beijing Action Plan*) merumuskan strategi dan pola kemitraan dalam penanganan dan pengurangan bencana di kawasan Asia dengan melibatkan semua pihak terkait. Selain menegaskan kembali komitmen terhadap pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo, Rencana Aksi Beijing juga menghasilkan kesepakatan bahwa semua negara di Asia diharapkan segera memprioritaskan penyusunan RAN-PRB.

Kawasan Asia merupakan kawasan yang rawan bencana, baik bencana alam, wabah penyakit maupun bencana sosial. Untuk itu kerjasama regional dalam pengurangan risiko bencana di Asia mutlak dilakukan dan didukung oleh lembaga dan institusi kerjasama regional dan sub-regional yang ada.

### 3.3. Landasan Nasional

Undang-undang Dasar tahun 1945 memuat pasal-pasal yang berhubungan dengan kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bencana. Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", yakni memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan dari ancaman bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam pasal 12 dan 33 ayat 3. Berbagai undang-undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana seperti Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum Pertahanan Dan Keamanan Negara, Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Perencanaan Tata Ruang, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

---

Sesuai amanat kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional dan regional, pengurangan risiko bencana wajib dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera melaksanakan kesepakatan tersebut dengan memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka pembangunan nasional, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.

### 3.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya pengurangan risiko bencana tidak dibahas secara khusus namun lebih banyak dibahas dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber daya Alam dan Lingkungan. Pada umumnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari kegiatan/program yang tersebar di sektor-sektor terkait.

### 3.3.2. Rencana Kerja Pemerintah

Setiap tahun pemerintah menyusun RKP yang memuat semua program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap sektor pada tahun berjalan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006, kegiatan pengurangan risiko bencana dialokasikan pada arah kebijakan Penanggulangan Bencana Alam yang dampaknya mengimbas terhadap keselamatan bangsa melalui:

1. Peningkatan mitigasi bencana alam dan prakiraan iklim
2. Penyusunan tata ruang dan zonasi perlindungan sumber daya alam termasuk kawasan rawan bencana di pesisir dan laut
3. Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam dan sistem deteksi dini

Dalam RKP tahun 2007 yang telah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2006, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana merupakan salah satu prioritas dari sembilan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana pada tahun 2007 dibagi dalam dua sasaran utama, yaitu (1) tetap terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

---

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara, terselesaikannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam di Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, serta (2) dapat diselesaikannya kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pada beberapa daerah lainnya yang mengalami bencana alam pada tahun 2005 dan 2006. Sasaran utama berikutnya adalah meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi.

Upaya pengurangan risiko bencana saat ini dilaksanakan oleh departemen/lembaga terkait secara sektoral dalam program departemen/lembaga yang bersangkutan. Rencana aksi ini antara lain disusun untuk mempermudah identifikasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di setiap departemen/lembaga terkait.





 REPUBLIK INDONESIA  
**SOSIALISASI RENCANA AKSI NASIONAL  
PENGURANGAN RESIKO BENCANA**  
MAKASSAR, 1 DESEMBER 2009

---

# RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA

# IV

Upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia diletakkan dalam suatu kerangka pelaksanaan yang memprioritaskan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. RAN-PRB menetapkan beberapa prioritas pelaksanaan yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam rencana yang lebih operasional.

## 4.1. Prioritas

Pengurangan risiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif

## 4.2. Upaya dan Rencana Aksi

Sebagai penerjemahan dari pergeseran paradigma ke arah perlindungan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat, pengurangan risiko bencana harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Menghargai hak untuk hidup dan kehidupan yang bermartabat dan pemerintah bertanggung jawab memastikan perlindungan dari risiko bencana yang sejatinya terhindarkan
- b. Bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana dari proses-proses pembangunan yang tidak berkelanjutan dan yang diperburuk oleh perubahan iklim
- c. Akuntabel kepada masyarakat berisiko dan atau terkena bencana serta didorong untuk meningkatkan partisipasi, ekuiti dan keadilan serta dilaksanakan dengan perspektif jender

Dengan berdasarkan kepada prioritas pelaksanaan pengurangan risiko bencana maka upaya dan rencana aksi yang dilakukan meliputi:

1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, dengan kegiatan-kegiatan utama antara lain:
  - 1) Kelembagaan nasional dan kerangka hukum
    - i. Menyusun atau memperkuat mekanisme pengurangan risiko bencana yang terpadu
    - ii. Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, termasuk strategi pengurangan kemiskinan serta kebijakan dan perencanaan sektoral dan multi sektoral
    - iii. Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana
    - iv. Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal, melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk pengurangan risiko kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah
  - 2) Sumber daya
    - i. Mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang ada dan menyusun rencana serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk

- 
- memenuhi kebutuhan di masa mendatang
  - ii. Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program-program, hukum dan peraturan dalam upaya pengurangan risiko bencana
  - iii. Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam program pembangunan
- 3) Partisipasi Masyarakat
- Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini, dengan kegiatan-kegiatan:
- 1) Pengkajian risiko pada skala nasional dan lokal
    - i. Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan peta risiko beserta informasi terkait terutama kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat umum
    - ii. Mengembangkan sistem indikator risiko bencana dan ketahanan di pusat dan di daerah, yang akan membantu para pengambil keputusan dalam mengkaji dampak bencana
    - iii. Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian
  - 2) Peringatan Dini
    - i. Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang harus dilakukan pada saat ada peringatan
    - ii. Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini
    - iii. Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini terintegrasi dengan baik dengan kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan
    - iv. Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku kepentingan dalam rantai sistem peringatan dini

- v. Menciptakan dan memperkuat sistem peringatan dini yang efektif untuk pulau-pulau kecil
- 3) Kapasitas
- i. Mendukung pengembangan dan pelestarian infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan, dan apabila memungkinkan perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di masa mendatang
  - ii. Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran dan penyebaran data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan peringatan dini
  - iii. Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas pengkajian risiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian, kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis
  - iv. Menciptakan dan memperkuat kapasitas merekam, menganalisis, merangkum, menyebarkan dan saling bertukar data dan informasi
- 4) Penanganan risiko bencana di tingkat regional
- i. Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana
  - ii. Melakukan kerjasama dalam lingkup regional dan internasional untuk mengkaji dan memantau bencana lintas batas
  - iii. Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam hal peningkatan kerentanan dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam merespons bencana
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
- 1) Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi
- i. Menyediakan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi
  - ii. Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan risiko bencana
  - iii. Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ilmuwan dan praktisi di

- 
- bidang pengurangan risiko bencana
- iv. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknologi untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana
  - v. Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
  - vi. Institusi yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah
  - vii. Memperbarui dan menyebarluaskan terminologi internasional yang standar tentang pengurangan risiko bencana
- 2) Pendidikan dan Pelatihan
- i. Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan risiko bencana yang relevan pada kurikulum sekolah
  - ii. Mempelopori implementasi pengkajian risiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi
  - iii. Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah
  - iv. Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan risiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah daerah)
  - v. Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan pada aturan-aturan bagi sukarelawan
  - vi. Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen rentan lainnya
- 3) Penelitian
- i. Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi risiko dan analisis sosio-ekonomi serta cost-benefit dalam kegiatan pengurangan risiko bencana
  - ii. Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.
- 4) Kepedulian Publik
- Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana dan meningkatkan keterlibatan masyarakat

4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana, meliputi kegiatan-kegiatan :
  - 1) Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
    - i. Memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem secara lestari, termasuk melalui rencana pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan pembangunan yang mengurangi risiko dan kerentanan
    - ii. Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana
    - iii. Melakukan penyesuaian antara pengurangan risiko bencana dengan perubahan iklim saat ini dan masa mendatang
  - 2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi
    - i. Meningkatkan ketahanan pangan
    - ii. Menggabungkan perencanaan pengurangan risiko bencana dalam sektor kesehatan untuk menciptakan rumah sakit yang bebas dari dampak bencana
    - iii. Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap bencana
    - iv. Memperkuat pelaksanaan mekanisme jaring pengaman sosial
    - v. Menyatukan pengurangan risiko bencana dalam pemulihan paska bencana dan proses rehabilitasi
    - vi. Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh perpindahan manusia
    - vii. Mengupayakan diversifikasi pendapatan untuk masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana
    - viii. Membangun mekanisme pendanaan risiko bencana seperti asuransi bencana
    - ix. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana
    - x. Membangun instrumen keuangan alternatif dan inovatif (seperti meningkatkan peran asuransi bencana dan mensosialisasikannya pada setiap lapisan masyarakat) dalam rangka mengurangi risiko bencana.
  - 3) Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya
    - i. Memasukkan aspek pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan dan pengelolaan pemukiman tahan bencana
    - ii. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam prosedur perencanaan proyek-proyek infrastruktur utama, termasuk kriteria desain, persetujuan dan pelaksanaan proyek itu sendiri

- 
- iii. Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan risiko bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan dan meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini
  - iv. Mengintegrasikan pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan pengembangan perkotaan
  - v. Menyempurnakan NSPM dan aturan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang ada
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif, meliputi kegiatan-kegiatan:
- 1) Memperkuat kebijakan, kemampuan teknis dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana regional, nasional dan lokal, termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia dan lain-lain.
  - 2) Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani peringatan dini, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan
  - 3) Memperkuat dan bila perlu membangun koordinasi kewilayahan dan membuat atau meningkatkan kebijakan regional, mekanisme operasional dan sistem komunikasi perencanaan untuk menyiapkan respons yang efektif dalam kasus bencana antar negara
  - 4) Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua tingkatan
  - 5) Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana
  - 6) Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat



RAN-PRB ini merupakan pedoman bagi upaya pencegahan dini terhadap dampak bencana. Pelaksanaan rencana aksi ini akan dilakukan secara sinergis dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, diperlukan komitmen yang serius, terpadu dan konsisten dari para pemangku kepentingan terkait.

## 5.1. Mekanisme

Setiap program prioritas yang telah dijabarkan dalam bentuk rencana tindak memuat kegiatan, instansi terkait dan sumber pendanaannya. Selanjutnya rencana aksi ini akan diturunkan menjadi rencana tahunan yang akan dilakukan oleh:

- a. Departemen/lembaga pemerintah non-departemen (LPND) terkait sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan
- b. Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan terlebih dahulu menetapkan tipologi/karakteristik bencana di masing-masing daerah

Pelaksanaan rencana aksi ini dilaksanakan oleh instansi terkait dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah. Koordinasi pelaksanaan rencana aksi yang disusun oleh departemen/LPND dan pemerintah daerah akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

## 5.2. Kelembagaan

Untuk melaksanakan Rencana Aksi ini perlu diatur suatu bentuk kelembagaan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam upaya pengurangan

- risiko bencana, RAN-PRB akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Instruksi Presiden yang mengikat semua departemen/LPND dan pemerintah daerah terkait untuk melaksanakannya
2. Untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi ini perlu dibentuk jejaring antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga lainnya
  3. Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan

### 5.3. Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan swasta dan lembaga donor regional maupun internasional. Anggaran yang berasal dari dana APBN dan APBD dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas, masyarakat dan pihak swasta diharapkan berperan lebih besar dalam mendukung pendanaan upaya pengurangan risiko bencana. Di samping itu, dukungan pendanaan dari donor regional maupun internasional juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup yang lebih luas.

Daerah yang menyandarkan diri pada industri ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan diharapkan melakukan investasi yang seimbang untuk upaya-upaya mitigasi, kesiapan, respon dan pemulihan dari dampak bencana yang sudah atau mungkin ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

### 5.4. Indikator

Untuk menjaga akuntabilitas pengurangan risiko bencana dalam kebijakan pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan

---

pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke desa.

Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia dapat diukur dari indikator-indikator berikut:

1. Aspek Umum

Secara umum efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana dapat diukur dari:

- (1) Peningkatan jumlah jiwa yang selamat pada kejadian bencana
- (2) Penurunan jumlah korban yang terluka/cedera akibat bencana
- (3) Penurunan signifikan persentase masyarakat yang terkena dampak kejadian bencana
- (4) Persentase jumlah penduduk korban bencana yang dapat dihitung pada waktu tertentu setelah bencana
- (5) Tersedianya standar ketahanan bangunan dan lahan
- (6) Kapasitas penanganan tanggap darurat

2. Aspek Ketahanan Terhadap Bencana

Ditinjau dari aspek ketahanan dalam menghadapi bencana, keberhasilan Pengurangan Risiko Bencana dapat diukur dari:

- (1) Distribusi tingkat pendapatan masyarakat
- (2) Tingkat pencapaian pendidikan
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan medis
- (4) Tingkat pengangguran
- (5) Ketersediaan dan ketahanan bangunan perumahan
- (6) Angka kelahiran dan kematian pada berbagai kelompok sosial
- (7) Kualitas hidup
- (8) Ketahanan hidup
- (9) Ketahanan lingkungan
- (10) Ketahanan ekonomi lokal

3. Aspek Cakupan Wilayah

Secara nasional keberhasilan pengurangan risiko bencana dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Bencana Nasional.

- (1) Indeks Risiko Bencana Nasional digunakan untuk mengukur risiko bencana di suatu negara yang meliputi penilaian terhadap indikator bencana, indikator fisik dan ketahanan sosio-ekonomi masyarakat

- 
- (2) Indeks Ketahanan Bencana Nasional, digunakan untuk mengukur kapasitas manajemen risiko bencana, kelembagaan, kepedulian terhadap risiko bencana, kesiapan pendanaan dan kesiapan tanggap darurat

Strategi komprehensif pengurangan risiko bencana akan disusun untuk kawasan-kawasan yang mempunyai indeks risiko tinggi dan indeks ketahanan yang rendah.

#### 4. Aspek Kebijakan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana

Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa lepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dapat dilihat dari:

- (1) Tingkat kesiapan dan waktu yang diperlukan untuk tanggap darurat
- (2) Periode pemulihan dan tingkat efisiensi pemulihan
- (3) Kerugian dibandingkan dengan biaya pemulihan
- (4) Besaran biaya sistem pengurangan risiko bencana
- (5) Lingkup perencanaan dan pengelolaan kebencanaan
- (6) Penyediaan pendukung sosial/program jaring pengaman sosial untuk mendukung ketahanan terhadap bencana
- (7) Kesiambungan sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana
- (8) Lingkup, relevansi dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana, risiko dan ketahanan terhadap bencana
- (9) Proses untuk mengkaji ulang, memperbarui dan memelihara Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara rutin
- (10) Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah, swasta, LSM, perkumpulan profesi dan individu





---

# PENUTUP VI

Banyaknya daerah yang rawan bencana di Indonesia dan kesadaran akan pentingnya peningkatan upaya pengurangan risiko bencana merupakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu dan terarah. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang disusun dengan mengacu pada landasan penanganan bencana global dengan sekaligus memberi penekanan pada kondisi kebencanaan lokal ini merupakan dokumen yang akan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dengan kebencanaan di Indonesia. Komitmen seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait merupakan suatu hal yang mutlak dibangun dan dibina dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana.









Rencana Aksi ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam rencana tahunan yang akan disusun berdasarkan prioritas kebutuhan penanganan bencana dan sesuai kebijakan pemerintah. Diharapkan rencana ini akan selalu bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan kebencanaan di Indonesia dan perkembangan di tingkat regional maupun internasional.



---

# LAMPIRAN

## Matriks Status dan Rencana Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
1	Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan							
a.	Penyusunan atau penguatan mekanisme pengurangan risiko bencana yang terpadu	Telah dilakukan kegiatan Peace trough Development Analysis dan pencetakan Resources Pack Book	Review Grand Strategy penanganan konflik (lanjutan)	BAPPENAS				
		Telah disusun konsep Decentralized Conflict Sensitive Planning (DCSP)	Penyusunan DCSP (lanjutan)	BAPPENAS, UNDP				
		Tindak lanjut Kerangka Aksi Hyogo tingkat nasional	Membentuk platform nasional untuk PRB di Indonesia	BAKORNAS PB dan BAPPENAS				
		Belum tersedia SOP penanganan bencana dan data kebencanaan	Membentuk SOP penanganan bencana dan menyediakan data kebencanaan dengan mengaktifkan sumber daya di daerah dalam penanganan bencana geologi sesuai dengan bimbingan melalui penerbitan SNI penanggulangan bencana geologi	DESDM				
		Telah tersusun Kerangka Aksi Hyogo dalam versi Bahasa Indonesia	Mendukung diseminasi kepada pemerintah di tingkat nasional, daerah dan masyarakat.	MPBI				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Kelembagaan PB menjadi perdebatan di Pansus DPR	Mendekatkan proses antara pemerintah dengan DPR dalam dialog kelembagaan	MPBI, BAKORNAS PB, DPR	■			
		Belum ada kerangka Community-Based Risk Reduction	Membuat kerangka CBRR melalui simposium nasional dan penerbitan	MPBI, IFRC/PMI	■			
		Telah terbentuk PSC di 6 Provinsi	Membentuk PSC di kabupaten/kota dan Provinsi	DEPKES	■	■		
		Belum ada koordinasi manajemen risiko bencana di tingkat nasional	Mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam aktivitas Good Governance	DEPDAGRI-GTZ/Good Governance	■	■	■	■
		Sedang disiapkan kegiatan Project Management of Georisk, bagian dari proyek Good Local Government (2006-2009), bagian dari proyek Civil Society and Inter-Municipal Cooperation for better Urban Services/Urban Quality (2003-2005)	Membantu memformulasikan RUU PB  Membantu memperkenalkan RUU PB ke dalam tingkatan pembuatan kebijakan nasional  Membantu integrasi kegiatan mitigasi ke satu strategi mitigasi nasional	BAKORNAS PB, DEPAGRI, DEPKES, Dep. PU (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■	■	■	■
		Sedang disusun konsep panduan untuk penanggulangan bencana multi-hazard di Jateng, NTB dan NTT. Hasilnya akan disosialisasikan ke pemda						

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		setempat dan wakil-wakil penduduk/masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana						
		Sedang proses penyusunan konsep manajemen risiko bencana berbasis masyarakat						
		Sosialisasi dan proses penyusunan buku tentang bencana kebakaran pada gedung-gedung vital dan bangunan tinggi	Peraturan keharusan pelaksanaan simulasi kebakaran dan kerusuhan	Dep. PU, UNHAS				
		Masih lemah atau sedikitnya organisasi LSM atau Pokmas pada kelompok rentan	Pengembangan organisasi dan program yang ditujukan kepada kelompok rentan	CDS-UUI bekerjasama dengan LSM lokal, nasional dan internasional				
		Sedang disiapkan pembentukan tim lelang dan tim teknis	Menyusun pedoman umum pembangunan rumah tahan bencana	Kementerian Perumahan Rakyat				
		Sedang disiapkan pembentukan tim lelang dan tim teknis dan penajaman KAK	Menyusun strategi penanganan paska bencana alam bidang perumahan	Kementerian Perumahan Rakyat				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
b.	Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan	Belum dimasukkannya PRB dalam RPJM  Sedang proses dimasukkannya Pengurangan Risiko Bencana dalam RKP  Pedoman Penanganan Bencana saat ini masih menggunakan petunjuk penanganan bencana BAKORNAS PB tahun 1994	Memasukkan PRB dalam RKP  Menyusun pedoman nasional penanganan bencana yang baru	BAKORNAS PB dan BAPPENAS  BAKORNAS PB dan instansi-instansi/ lembaga terkait				
			Mengembangkan Kerangka Aksi Hyogo sampai pada indikator, program dan kegiatan di tingkat nasional dan daerah	MPBI - Care, BAKORNAS PB, BAPPENAS, SATKORLAK PB, SATLAK PB				
		Telah tersedia dan dikelola data geospasial untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias serta mendukung BRR NAD-Nias	Mengelola data geospasial untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias serta mendukung BRR NAD-Nias	BAKOSURTANAL, BRR, Dep. PU				
		Belum tersedia atlas tsunami nasional	Menyusun atlas tsunami nasional	BAKOSURTANAL atau Instansi terkait				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Menyusun peta multi-bencana (integrasi peta rawan bencana dari berbagai instansi)					
		DKP dan 15 provinsi serta 43 kab/kota telah melakukan survei data dasar dan tematik kelautan termasuk bencana di wilayah pesisir (coastal hazard)	Menyusun Renstra Mitigasi Bencana dan Pencemaran di Wilayah Pesisir Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan NTB	DKP dan BAKOSURTANAL				
		Belum tersedia peta rawan bencana; peta kawasan bencana geologi untuk perencanaan tata ruang, peta bencana gunung berapi, peta rawan bencana tanah longsor, peta erosi dan gerakan tanah.  Memasukkan rekomendasi teknis penanggulangan bencana dengan prioritas pada daerah pemukiman padat dan aktifitas tinggi yang memiliki bangunan vital dan strategis ke dalam Perda	Mengkaji bahaya geologi, kerentanan infrastruktur dan georisks pada tingkat daerah serta mendiseminasikan informasi ke pemda sbg acuan dalam penyusunan Perda  Mengkompilasikan peraturan-peraturan serta UU mengenai pengelolaan sumber daya alam dan bencana	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Belum dilaksanakan pelatihan manajemen bencana untuk perencanaan pembangunan bagi eksekutif dan legislatif provinsi, kabupaten/kota (Yogyakarta, Riau, Maluku Utara, Manado) Bekerjasama dengan INDES dan UNDP	Melaksanakan pelatihan manajemen bencana untuk perencanaan pembangunan bagi eksekutif dan legislatif provinsi, kabupaten/kota bagi wilayah lain	UPN Veteran Yogyakarta	■	■		
		Belum ada informasi kawasan rawan bencana (gunung berapi, longsor) kerjasama dengan Yayasan PIKUL	Penyediaan informasi kawasan rawan bencana bagi wilayah lain		■	■		
		Sedang disusun konsep manajemen risiko bencana berbasis masyarakat yang dapat diadopsi di seluruh wilayah Indonesia	Melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi ke satu strategi mitigasi nasional	DKP	■	■		■
		Banyak daerah belum memiliki rencana penanganan bencana (disaster management plan) di wilayahnya	Mendorong penyusunan disaster management plan untuk tingkat provinsi dan kabupaten	DKP	■	■		■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
c.	Adopsi atau modifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko bencana	Sedang disusun Rancangan Undang-Undang Kebencanaan yang melibatkan seluruh instansi terkait, DPR-RI, dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Melanjutkan pembahasan RUU Kebencanaan bersama DPR	DPR dan instansi terkait	■			
		Belum ada payung hukum bagi penanganan konflik di Indonesia	Menyiapkan RUU penanganan konflik di Indonesia	DEPHAN, DEPdagri, DEPKUMHAM	■	■		
		Sedang disusun RUU Penanganan Bencana	Menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana UU dalam PRB	BAKORNAS PB SATKORLAK PB SATLAK PB	■	■	■	■
		Sedang dikumpulkan data investigasi gedung/infrastruktur yang tahan gempa	Menyelenggarakan seminar hasil investigasi sebagai masukan untuk PU dalam Diskusi Nasional untuk penentuan building codes	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM/Dep. PU	■	■	■	
		Sedang dikumpulkan informasi tentang asuransi yang memiliki program kebencanaan, metode yang digunakan dalam menganalisis dan menghitung bencana suatu daerah.	Menyelenggarakan seminar asuransi risiko bencana yang akan mengundang pihak-pihak terkait (Munich RE-Insurance).		■		■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Telah disusun konsep Peraturan Presiden tentang Kawasan Lindung Geologi, termasuk Kawasan Rawan Bencana Geologi	Melestarikan kawasan geologi yang spesifik dan terancam rusak serta mendorong pemda memantau penggunaan lahan sesuai dengan kaidah kawasan rawan bencana	DESDM	■			
		Terbatasnya kemampuan mengeksplorasi isi ketentuan, pedoman tentang kebijakan dan program PB Bansos dalam bentuk buku	Menyiapkan ketentuan dan pedoman tentang PB Bansos, seperti RUU PB, pedoman umum, pedoman teknis, dll	DEPSOS	■			
			Mendukung terbentuknya RUU PB yang mengandung unsur perencanaan dan pendanaan penanganan bencana	MPBI dan Pansus RUU PB	■	■		
		Sudah dilaksanakan dan masih akan dilaksanakan	Pembahasan RUU PB oleh DPR dengan input perspektif hukum internasional, PB yang komprehensif dan perspektif hukum perdata, administrasi, dan tata negara	MPBI, Care Internasional Indonesia, UNDP, OXFAM, IFRC, PMI	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
d.	Identifikasi pola risiko bencana lokal dan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk pengurangan risiko bencana ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah	<p>Pemantauan kegiatan gunung api aktif melalui pos pengamatan, membangun titik-titik pengamatan gerakan tanah pada jalur jalan rawan longsor.</p> <p>Sedang disiapkan masyarakat dalam mengantisipasi jika terjadi bencana</p> <p>Daerah belum memiliki Pedoman Penanganan Bencana (Disaster Management Plan) di wilayahnya</p>	<p>Membangun regional center guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keakuratan untuk menunjang sistem peringatan dini letusan gunung berapi.</p> <p>Menambah jumlah titik pengamatan gerakan tanah dan lokasi pada jalur jalan vital dan\ strategis</p> <p>Mendorong penyusunan Disaster Management Plan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten</p>	DESDM	■	■	■	■
		<p>Sedang disiapkan kajian risiko bencana geologi di Jateng, NTB dan NTT (peta-peta daerah rawan bencana, dan rekomendasi teknis sebagai masukan bagi Pemda dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemegang otoritas daerah (UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah)</p>	<p>Menyusun metode bagaimana bencana geologi, kerentanan infrastruktur, georisk assessment bisa dilakukan. Kompilasi geohazards assessment, data geologi, hidrogeologi, gempa bumi, lahar dan debris flow, longsor dan banjir yang akan digabung dengan data sosiografik. Metode yang diperoleh dapat diadopsi di daerah Indonesia lainnya sebagai standar</p>	<p>BAKORNAS PB SATKORLAK PB SATLAK PB</p> <p>BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM</p>	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Telah dilaporkan kajian kebencanaan dan rekomendasi teknis penanganan/ penanggulangan mitigasi bencana geologi yang disampaikan ke BAKORNAS PB dan Pemda	Mendorong pemda agar arif dalam menjalankan rekomendasi teknis tentang kebencanaan geologi	DESDM	■	■	■	■
		Kerjasama dengan Pemda dalam penyusunan Peta Rawan Bencana rinci (tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa)	Dengan SNI diharapkan Pemda dapat menyusun peta rawan bencana dengan skala rinci. (dengan prioritas bencana gerakan tanah)	DESDM	■	■	■	■
e.	Pengkajian kapasitas SDM dalam PRB, meningkatkan perencanaan dan capacity-building	Terbatasnya pengetahuan aparat dalam pengurangan risiko bencana	Menyusun pedoman peningkatan kemampuan nasional dan daerah dalam pengurangan risiko bencana	BAKORNAS PB SATKORLAK PB SATLAK PB	■	■	■	■
		BAKORNAS telah melaksanakan Lokakarya Manajemen Kedaruratan dan Perencanaan Kontinjensi untuk aparat Pemerintah di Kepulauan Mentawai (7-10 Maret 2006) - OCHA Unearmarked Funds Project	Bersama-sama UNTWG mengevaluasi rangkaian kegiatan yang telah dilakukan (evaluasi dari sisi penyelenggaraan lokakarya, materi pelatihan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah)	BAKORNAS PB UNTWG UNESCO	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		DKP telah melakukan pelatihan untuk pelatih (ToT) mitigasi bencana di wilayah pesisir pada tahun 2005 dan 2006	Menyelenggarakan pelatihan pada tingkat provinsi di Sumbang, Jabar, Jatim, Bali dan NTB bekerjasama dengan IOTWS-USAID	DKP	■	■	■	
		Mendukung Yayasan IDEP dalam pelatihan untuk fasilitator kegiatan "Community-based Disaster Management"	Menerapkan hasil kegiatan pelatihan CBDM melalui jaringan organisasi Pramuka	UNESCO Yayasan IDEP MPBI	■			
		Penyusunan kerangka untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dan gempa bumi (Proyek UN-ISDR)	Pengujian kerangka untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat di tiga pilot sites: Padang, Bengkulu, dan dua desa di Aceh	UNESCO LIPI	■			
		Persiapan untuk peninjauan kapasitas sumber daya staf lembaga pemerintah dan non-pemerintah di beberapa provinsi yang dipilih	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan penanganan dampak bencana bagi pelaku di tingkat provinsi dan kabupaten	Oxfam, SATKORLAK PB, SATLAK PB	■	■		
			Penentuan kelompok masyarakat rawan bencana di 5-10 provinsi untuk menjalankan Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (MPBBM)	Oxfam bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Menyusun Materi dan alat Pelatihan MPBBM bagi kelompok masyarakat rawan bencana	Oxfam bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah	■	■		
			Menyelenggarakan Pengenalan MPBBM kepada Pemerintah Daerah, LSM dan aktor lain	Oxfam bekerjasama dgn lembaga pemerintah dan non-pemerintah	■		■	
			Menyusun Materi dan alat Pelatihan MPBBM untuk penyebarluasan gagasan dan pembelajaran dari pengalaman.	Oxfam bekerjasama dgn lembaga pemerintah dan non-pemerintah.	■	■	■	
			Menyelenggarakan serial Pelatihan MPBBM dari Tingkat Dasar, Tingkat Fasilitator dan Pelatihan Bagi Pelatih.	Oxfam akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Mendokumentasikan dan menyebarluaskan pelaksanaan MPBBM	Oxfam akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.	■			
			Peningkatan kapasitas untuk pengelolaan jalan	JICA, PU	■	■	■	
		Mendukung BAKORNAS melaksanakan Lokakarya Manajemen Kedaruratan dan Perencanaan Kontinjensi untuk aparat Pemerintah - OCHA	Bersama-sama UNTWG-DRR mengevaluasi rangkaian kegiatan yang telah dilakukan (evaluasi dari sisi penyelenggaraan lokakarya, materi dan koordinasi dengan pemerintah daerah) untuk menetapkan rencana lokakarya berikutnya di provinsi-provinsi rentan bencana lain	BAKORNAS PB UNTWG-DRR	■	■		
f.	Alokasi sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan, program, hukum dan perundangan terkait	Assesment pemberdayaan masyarakat, aparat Pemda (Project Mitigation for Geohazards, 2003-2005, Yogyakarta, Kulon Progo, Ende, dan Maumere) dalam	Proyek Mitigation for Geohazards akan diteruskan Georisk Project, dengan metode implementasi hampir sama di beberapa pilot areas	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
	dengan penanganan risiko bencana	mengantisipasi bencana geologi yang mengancam daerahnya (CBDRM), dengan cara menyebarkan kuesioner yang merupakan masukan dalam penyusunan peta kerentanan	Penguatan tugas task force capacity dari Badan Geologi, sebagai bagian dari service advisory yang akan diberikan kepada provinsi, kota, daerah dan desa rawan bencana yang terpilih		■	■	■	■
		Membentuk Dewan Pakar beranggotakan 30 orang yang berlatar belakang disiplin ilmu dan keahlian yang beragam	Meningkatkan intensitas pertemuan-pertemuan dengan berbagai unsur PB Bansos melalui lokakarya dan pelatihan	DEPSOS, KLH	■			
		Tahun 2004-2006 telah dialokasikan kegiatan pembuatan green belt mangrove untuk pesisir Demak	Pembuatan rumah nelayan ramah gempa, tsunami dan banjir/rob untuk Kabupaten Tangerang, Pacitan, Tegal, Pekalongan, dan Lokasi-lokasi pesisir Sulawesi Selatan  Penanaman green belt/ vegetasi pesisir dan pembuatan mitigasi struktural lain	DKP, UNHAS	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
g.	Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik utk menerapkan upaya pengurangan risiko ke dalam program pembangunan	Kelembagaan penanganan bencana saat ini kurang sesuai dengan situasi	Merevitalisasi struktur organisasi BAKORNAS PB, SATKORLAK dan SATLAK	BAKORNAS PB	■	■		
			Mendorong peningkatan komitmen politik dalam PRB di lingkup daerah, nasional dan internasional melalui kerangka institusi pemerintah, perundang-undangan, pengembangan organisasi dan peran serta masyarakat	UNICEF, BAKORNAS PB, DEPDAGRI, DEPKES, DKP, DEPSOS, BKKBN, Dep. PU, KEMENKO KESRA, DEPKUMHAM, Kejaksaan, POLRI, DEPPERIN, DEPDAG, DEPKOMINFO, BPS, KEMENEG PP, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Alokasi dana untuk PB masih tidak memadai	Meningkatkan sumber dana untuk kegiatan PRB dan Penanganan Bencana Meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemanfaatan TNI sebagai sukarelawan Akuntabilitas dan transparansi	BAPPENAS, KLH, DEPSOS, TNI				
h.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB melalui kebijakan dan pengembangan jaringan	KBBM (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) dan PERTAMA (Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat) yang telah dilaksanakan di Sulsel, Sulbar, Sumbbar, Lampung, Kalsel, Sumut, NAD dan DKI Jakarta diintegrasikan secara terpadu dalam rencana induk pembangunan lokal	Menjaga integritas program KBBM dan PERTAMA dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan setempat.	PMI				
		Partisipasi masyarakat dalam PRB masih sangat rendah	Pembuatan Pedoman Panduan PRB Berbasis Masyarakat (CBDRM)  Membangun kesadaran kolektif masyarakat atas antipisipasi serta penanggulangan bencana	BAKORNAS PB LSM Lokal, Pemerintahan tingkat bawah (Kades, Camat, Lurah, Bupati)				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Mendekatkan aparatur ke masyarakat melalui diskusi-diskusi, silaturahmi, dll					
			Mengintegrasikan pendapat publik ke dalam rencana tata ruang serta contingency planning melalui partisipasi awal dalam proses pengambilan keputusan	BAKORNAS PB dan DEPdagri, Dep. PKES, Dep. PU (didukung BGR/ GTZ melalui Georisk Project)				
		Tahun 2005 DKP telah menyusun komik kampanye kesadaran mitigasi bencana tsunami yang dibagikan ke pelajar dan masyarakat	Pelatihan di tingkat kabupaten/kota di masing-masing provinsi	DKP				
		Community Based Risk Reduction (CBRR) dilaksanakan di Sumut (Langkat dan Labuhan Batu) dan Kalsel (Banjar) tanggal 6 Agustus 2006	Melanjutkan proyek didanai oleh Rencana Aksi ke-4 SEA DIPECHO	DIPECHO PMI				
		Pengkajian ulang sosialisasi penanggulangan bencana geologi kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah setempat	CBDRM untuk sensitisasi pengambil kebijakan setempat dan wakil masyarakat, pembentukan tim CBDRM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PRB	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Fasilitasi masyarakat dalam penguatan kapasitas menghadapi bencana (implementasi CBDM toolkit)	UNESCO Pramuka	■	■		
		Pelatihan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas bagi Masyarakat di kawasan rawan bencana kerjasama UNDP  Menyusun Panduan Riset Partisipatoris untuk Manajemen Bencana Berbasis Komunitas bekerjasama dengan Oxfam (2000) MPBI (2005)  Penerbitan Jurnal ilmiah manajemen bencana dan lingkungan bekerjasama dengan HIVOS (2006)	Pelatihan Manajemen Bencana Berbasis Komunitas bagi Masyarakat di kawasan rawan bencana (Perluasan kegiatan)	BAPPENAS, UNDP, UPN Veteran Yogyakarta, Oxfam, MPBI	■	■		
		Mendorong tersusunnya peraturan pemerintah dan terbentuknya community-based awareness dan preparedness karena bencana industri	Mendorong tersusunnya peraturan pemerintah dan terbentuknya community-based awareness dan preparedness karena bencana industri	MPBI - ITS	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Riset dan implementasi hasil riset CEEEDS pada bidang kegunaan dan konstruksi bangunan tahan gempa dan bahaya gunung Merapi	Peningkatan kapasitas institusi dan pendanaan melalui promosi dan kolaborasi dengan Lembaga Nasional dan Internasional	CDS-UUI bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
2.	Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini							
a.	Pengembangan dan penyebarluasan peta risiko bencana dan informasi PRB	Pelaksanaan kajian bencana dan rekomendasi teknis penangan/penangulangan mitigasi bencana geologi	Memantau pelaksanaan rekomendasi teknis di daerah	DESDM BAKORNAS PB Pemda				
		Penerbitan dan penyebaran buku saku, leaflet dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah	Memaksimalkan penyebaran buku saku, leaflet dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah di daerah rawan bencana geologi	DESDM				
		Penyediaan peta rawan bencana dan rekomendasi teknis penanggulangan bencana sesuai PP Nomor 25 tahun 2000 dan Keppres No 165 tahun 2000	Review, pemutakhiran peta rawan bencana dan kajian kebencanaan yang diprioritaskan pada daerah padat pemukiman dan aktifitas serta terdapat bangunan vital dan strategis	DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Menyusun Pedoman Pembuatan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung berapi	Menciptakan keseragaman metode pembuatan Peta KRB Gunung api	DESDM	■			
		Mengirimkan peta-peta rawan bencana, data kebencanaan, poster, leaflet, buku saku bencana geologi ke daerah	Meningkatkan pengiriman peta rawan bencana, data bencana, poster, leaflet, buku saku bencana geologi ke daerah	DESDM	■	■	■	■
		Bekerjasama dengan Pemda, secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan Peta Rawan Bencana secara rinci (tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa)	Pembinaan kepada Pemda agar dapat melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai SNI. (dengan prioritas bencana gerakan tanah)	DESDM	■	■	■	■
		Menyajikan peta-peta rawan bencana: rawan gempa bumi, tsunami, peta zona kerentanan gerakan tanah, peta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi	Penyusunan peta rawan bencana di beberapa daerah: peta rawan gempa bumi, tsunami, peta zona kerentanan gerakan tanah, peta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi	DESDM	■	■	■	■
		Membentuk alur informasi peringatan dini gunung api dari pos pengamat gunung api- DVMBG-Pemda-masyarakat, bandara terdekat juga asosiasi keselamatan penerbangan	Mengirimkan informasi wilayah-wilayah yang berpotensi longsor kepada Pemda	DESDM	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		sipil, dituangkan dalam SOP. Mengirimkan informasi wilayah potensi longsor kepada Pemda						
		Kerjasama penelitian dengan Vulcano Disaster Assistance Program (VDAP) United States Geological Survey di bidang gunungapi di daerah Minahasa, Sulawesi Utara	Melakukan pemetaan geologi bersama di Kaldera Tondano, instalasi peralatan seismik dan deformasi bantuan USGS di Lokon, Mahawu, Sopotan, dan G. Tangkoko dalam rangka pembentukan Kantor Regional Vulkanologi di Sulut	DESDM	■	■	■	■
		Pembuatan peta risiko bencana tsunami untuk Kota Padang, Pangandaran, Pacitan, Denpasar, Mataram dan Buru	Survei dan pemetaan risiko bencana tsunami untuk kota pantai	DKP	■	■	■	■
		Menyusun, mencetak dan menyebarkan brosur-brosur dan poster cara menghadapi gempa bumi (IUDMP 1999)	Pengembangan informasi dalam bentuk brosur dan poster untuk masyarakat dalam menurunkan risiko bencana	PMB-ITB kerjasama dengan DEPDIKNAS, lembaga donor	■	■	■	■
		Kajian risiko bencana di Bandung (1998), Bengkulu (2001), Palu, Denpasar, Manado (2002), Padang, Pesisir Selatan/Painan (2003) (IUDMP)	Kajian Risiko Bencana di Banda Aceh, Meulaboh dan Padang (2005-2006) Kajian Risiko Bencana di Nias dan Gunung Sitoli	PMB-ITB	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Analisis hazard dan zonasi gempa pulau Sumatera metode probabilitistik model sumber gempa 3 dimensi untuk masukan dalam Peraturan Bangunan Tahan Gempa Indonesia	Penyempurnaan/perbaikan Peta Zonasi Gempa Indonesia yang dilakukan dengan Analisis Sumber Gempa 3D	PMB-ITB, Ristek, PU				
			Pembuatan Peta Zonasi Tsunami Indonesia	ITB				
		Menyusun Peta Seismik risk	Menyusun peta seismik dan tsunami	BMG				
		Membentuk alur informasi gempa dan peringatan dini Tsunami.	Mengirimkan informasi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terkena tsunami kepada Pemda	BMG				
			Diseminasi peringatan dini bencana	BMG				
		Hasil pemetaan daerah rawan bencana diberikan dan disosialisasikan di daerah, sosialisasi SNI, menyebarluaskan informasi titik-titik rawan longsor jalur jalan utama dan alternatif	Sosialisasi hasil pemetaan daerah rawan bencana, sosialisasi SNI, informasi titik-titik rawan longsor jalur jalan utama dan alternatif, intensifikasi sistem peringatan dini	DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pemetaan rawan banjir	Pemetaan rawan banjir (lanjutan)	BAKOSURTANAL, PU, BMG, LAPAN	■			
		Pembuatan peta iklim, banjir, dan kekeringan/kebakaran hutan/lahan	Pembuatan peta iklim, banjir, dan kekeringan/kebakaran hutan/lahan (lanjutan)	LAPAN, BMG, Dep.PU	■	■	■	
		Beberapa daerah/provinsi telah menyusun Peta Geomedik	Pemetaan Geomedik di Kabupaten/Kota dan Provinsi Lokakarya Geomedik Mapping di setiap Provinsi	DEPKES	■	■	■	■
		Pembuatan Profil Bencana (kejadian dan peta rawan)	Melanjutkan pembuatan profil bencana (kejadian dan peta rawan)	DEPKES	■	■	■	■
		Pembuatan peta seismisitas	Peningkatan skala peta/Jangkauan	BMG BAKOSURTANAL	■	■		
		Pembuatan peta percepatan tanah	Pembuatan peta rawan tsunami	PU, DESDM	■	■		
		Kerjasama dengan DESDM dan BAKOSURTANAL dalam pembuatan peta rawan banjir, longsor, dan rawan kebakaran di Kabupaten	Perluasan wilayah pemetaan rawan banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan	DEPHUT, KMNHLH, UGM, ITB, Pemda, Instansi terkait lainnya	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Kerjasama dengan DEPHUT menyusun peta rawan kekeringan dan kebakaran hutan (Fire Danger Rating System)	Peta multi bencana (integrasi peta-peta bencana hasil berbagai instansi sesuai tugas dan fungsi)		■	■		
		Penyebaran profil bencana	Memperluas wilayah penyebaran profil bencana	DEPKES	■	■	■	■
		Sedang dilaksanakan (sistem peringkat bahaya kebakaran dan kekeringan)	Terus dilaksanakan (sistem peringkat bahaya kebakaran dan kekeringan)	LAPAN, BMG, DEPHUT	■	■	■	■
		Meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dalam menentukan titik-titik rawan bencana di Indonesia	Pembentukan Tim Terpadu	DEPHUB	■			
			Karakterisasi bencana alam gerakan massa (di Kulonprogo)	BPPT	■			
		Pembuatan peta-peta daerah rawan bencana geologi untuk perencanaan tata ruang, rawan longsor untuk disosialisasikan kpd masyarakat dan Penda di daerah rawan bencana	Advokasi hasil dari peta-peta tersebut akan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terkait (aparatur pemerintah, tokoh masyarakat)	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM	■	■		
		Tersedianya Peta Rawan Pangan Indonesia (tingkat kabupaten)	Update/memperbarui Peta Rawan Pangan untuk seluruh kabupaten di Indonesia	WFP, DEPTAN		■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Tersedianya Peta dan Analisis Nutrisi di Indonesia (tingkat kecamatan), terdiri dari 3 indikator: Gizi kurang pada balita, Angka kematian bayi, dan penduduk dengan asupan energi < 1700 kkal.	Sosialisasi hasil pemetaan nutrisi ke tingkat provinsi Pemanfaatan peta nutrisi untuk keperluan intervensi kesehatan dan gizi Pemanfaatan peta Nutrisi dengan mengombinasikannya dengan sumber informasi lain, seperti Peta Rawan Pangan, Peta Kemiskinan, dan lain-lain	WFP, BPS, DEPKES, MENKOKESRA dan instansi terkait lainnya	■	■		
		Pembuatan peta dasar dan peta rawan bencana Indonesia (khususnya di daerah operasional WFP: Aceh, NTT, NTB, Sulsel dan Jabodetabek)	Pembuatan peta dasar dan peta rawan bencana Indonesia.	WFP, SATKORLAK PB, instansi terkait		■		
			Pengumpulan informasi daerah-daerah rawan bencana, sumber daya lokal yang tersedia, kemampuan lokal, kemampuan logistik, informasi sosial-ekonomi	OCHA dan instansi terkait	■			
		Pemetaan partisipatif manajemen bencana alam (longsor: Kebumen di Jawa Tengah, Kulonprogo di Yogyakarta, Bawakaraeng di Sulsel, letusan gunungapi: Merapi di Jawa Tengah, Egon di Flores)	Pemetaan partisipatif manajemen bencana alam (longsor: Kebumen di Jawa Tengah, Kulonprogo di Yogyakarta, Bawakaraeng di Sulsel, letusan gunungapi: Merapi di Jawa Tengah dan memperluas wilayah)	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Menyusun sistem informasi kejadian bencana	Menyusun Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	
		Pendataan peristiwa bencana di Indonesia	Penyusunan sistem informasi risiko bencana	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	
		Analisis Hazard dan Zonasi Gempa Pulau Sumatera Metode Probabilistik Model Sumber Gempa 3 Dimensi untuk masukan dalam Peraturan Bangunan Tahan Gempa Indonesia (Proposal Riset Unggulan Terpadu 2005 - 2007)  Studi karakteristik gempa Aceh dan Nias untuk metode penyempurnaan Perencanaan Bangunan Tahan Gempa Indonesia  Evaluasi perbaikan Peraturan Bangunan Tahan Gempa Indonesia (SNI-1726-2002) Paska Gempa Aceh-Nias-Padang Penyempurnaan/perbaikan zonasi seismic	Memasukkan hasil analisis untuk penyempurnaan Peraturan Bangunan Tahan Gempa Indonesia	PMB-ITB, Ristek, PU	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pengumpulan dan kajian data kegunaan Indonesia untuk penyusunan zonasi kegempaan Indonesia (1994-2006)	Pengumpulan data gempa dan kajian hazard gempa probabilitistik sumber gempa 3D untuk perbaikan zonasi gempa Indonesia	ITB	■	■	■	■
			Mendorong pembuatan Disaster Plan di Jawa Timur	MPBI dan ITS	■			
		Pengembangan Sistem Informasi IPTEK dan Kebencanaan	Pengelolaan sistem informasi dan update data	PMB-ITB kerjasama dengan RISTEK	■	■		
			Pemetaan titik api kebakaran hutan	UNHAS		■	■	■
		Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana Alam	Rencana kegiatan kajian terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam di kota Bengkulu, Banten, Lampung, Maumere, Pacitan, Banyuwangi	LIPi		■		
		Modeling tsunami sebagai usaha mitigasi bencana	Melakukan pemetaan batimetri di pesisir kota Padang dan Bengkulu dan pemodelan run-up tsunami	Geoteknologi-LIPi; ITB	■			
			Rencana pemetaan batimetri di pesisir kota Banyuwangi, Maumere dan Pacitan dan pemodelan run-up tsunami	Geoteknologi-LIPi		■		












No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
b.	Pengembangan sistem indikator risiko bencana dan kerentanan dalam skala nasional dan lokal	Pembangunan sistem indikator risiko bencana nasional	Pengembangan sistem indikator risiko bencana nasional (lanjutan)	LAPAN	■			
		Belum ada Pedoman Pembuatan Peta Risiko Yang Standard/ Indikator	Membuat Pedoman Standar Peta Risiko Bencana	BAKORNAS PB BAKOSURTANAL	■	■		
		Belum ada sistem yang handal dalam informasi peringatan dini	Membuat jaringan komunikasi pusat dan daerah dalam rangka peringatan dini (kerjasama dengan Perancis)	BAKORNAS PB SATKORLAK PB SATLAK PB	■	■	■	
			Pemetaan Daerah Rawan Pangan Pemetaan Potensi Wilayah Berbasis Lingkungan Pemetaan Multi Rawan Bencana Alam Terpadu Penelitian Pemanfaatan Data IFSAR dan Aster Untuk Studi Deformasi Disaster Rapid Response Mapping	BAKOSURTANAL Instansi terkait	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			<p>Pedoman Pemetaan Risiko Bencana</p> <p>Penyusunan Peta Risiko Bencana Alam Nasional</p>	<p>BAKORNAS PB, BAKOSURTANAL, DESDM, BMG, PU, UGM, ITB</p>	■	■		
		<p>Terus dilakukan monitoring pelayanan transportasi udara pada daerah bencana</p>	<p>Pengembangan sistem database transportasi udara terpadu dalam rangka analisis bencana Pembangunan sistem peringatan bahaya banjir/longsor serta berpartisipasi dalam pembangunan sistem peringatan dini tsunami</p>	<p>DEPHUB</p>	■			
			<p>Penyusunan indeks kerentanan pesisir/kota pantai Indonesia terhadap bencana</p>	<p>DKP</p>		■	■	
		<p>Pembangunan sistem peringatan bahaya banjir/longsor serta berpartisipasi dalam pembangunan sistem peringatan dini tsunami</p>	<p>Pembangunan sistem peringatan bahaya banjir/longsor serta berpartisipasi dalam pembangunan sistem peringatan dini tsunami (lanjutan)</p>	<p>LAPAN</p>	■			
	<p>Menyediakan peta-peta rawan bencana, kuesioner yang disebarluaskan, yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh decision makers, untuk mengkaji dampak bencana dari kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi.</p>	<p>a. Advocacy Hasil dari tolak ukur tersebut akan disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan yang terkait</p>	<p>BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM</p>	■	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			b. National Natural Disaster Assessment (kuesioner akan disebarluaskan)					
			Pembuatan Peta Microzonasi Gempa, Peta Potensi Liku Kajian kesiapsiagaan Menghadapi Bencana ifaksi, Peta MMI, Peta Hazard Tsunami dan Hazard lain untuk kota rawan bencana	PMB-ITB, Pemda-Pemda, Ristek				
		Kajian kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Kajian singkat risiko (Rapid Risk Assessment) bencana di 14 kota Indonesia	PMB-ITB kerjasama dengan Ristek				
		Menyusun Indeks Risiko Potensi Bencana mencakup semua Kabupaten di Indonesia	Penyusunan peta potensi risiko bencana di beberapa lokasi tertentu untuk informasi kegiatan program	Oxfam, UPN, Instansi terkait				
		Penguatan kapasitas pemerintah, khususnya DEPKES, DEPTAN, BKKBN dalam sistem monitoring kewaspadaan pangan, gizi, dan mata pencaharian (dalam proses perencanaan)	Melakukan review, pembahasan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk focal point di instansi pemerintah terkait di 30 provinsi.	WFP, DEPKES, DEPTAN, BKKBN				
		Rencana	Pengembangan Metode Kajian risiko Kegempaan Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Daerah Perkotaan Indonesia	PMB-ITB				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Kajian Kerentanan dan risiko Bencana termasuk perencanaan jalur evakuasi maupun lokasi penampungan pengungsi	Kajian kerentanan wilayah dan masyarakat, perencanaan jalur dan tempat evakuasi di kota Padang, Kuta, Cilacap, Aceh dan Maumere	LIPI-URL Jerman-LAPAN				
c.	Pengumpulan, analisis dan sosialisasi informasi statistik kejadian bencana, akibat serta kerugiannya	Pengumpulan dan kajian data kegemapan Indonesia untuk penyusunan zonasi kegemapan Indonesia (1994-2005)	Pengumpulan dan kajian data kegemapan Indonesia untuk penyusunan zonasi kegemapan dalam skala lebih detail	ITB, BMG				
			Penyusunan database desa pesisir dan kerentanannya terhadap bencana berdasarkan data potensi desa BPS	DKP				
		Pengumpulan, analisis, dan sosialisasi informasi statistik kejadian bencana dari data penginderaan jauh maupun data lapangan yang diperoleh dari instansi/sumber lain	Pengumpulan, analisis, dan sosialisasi informasi statistik kejadian bencana dari data penginderaan jauh maupun data lapangan yang diperoleh dari instansi/sumber lain	LAPAN				
		Membantu Menyusun Konsep Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang dapat diadopsi di seluruh wilayah Indonesia	Membantu dalam perolehan pengetahuan yang luas dari kejadian-kejadian bencana selama dekade terakhir	BAKORNAS PB dan DEPdagRI, DEPKES, PU (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Me-set up struktur data, status sekarang, kurang lebih 7000 events bencana yang berbeda selama satu dekade terakhir ini di negeri ini telah didata	Akan terus diupdate. Dibutuhkan lebih dari 10 000 data untuk disaster events untuk keputusan investasi yang berdasarkan pada data/ informasi yang akurat dan menyeluruh	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM				
			Penyusunan peta dan jalur evakuasi Penyusunan mikrozonasi daerah rawan bencana	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				
		Penyusunan kerangka kerja untuk mengukur tingkat kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dan gempa bumi (Proyek UN ISDR)	Pengujian kerangka kerja untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat di tiga pilot sites: Padang, Bengkulu, dan dua desa di Aceh	LIPI -UNESCO (ITB-KOGAMI- Univ. Bengkulu)				
		Kajian dan analisis statistik internal quality assurance yang telah dilaksanakan untuk tujuan Total Quality Management	Analisis data statistik dengan pendekatan jangka panjang untuk perubahan peningkatan kerentanan dan risiko bencana	CDS-UII bekerjasama dengan Prodi statistik dan overseas practitioner				
			Pengembangan simulasi tsunami data base, run up dan integrasi data	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
d.	Pembangunan sistem peringatan dini	<p>Fire Danger Rating System (FDRS) sudah diadopsi oleh Dephut (terbentuknya Brigade Kebakaran Hutan) dan pemasangan AWS (Automatic Weather Station)</p> <p>Pemasangan Ocean Bottom Seismometer dan Tsunami Early Warning System Buoy di perairan barat Sumatera</p>	<p>Pemasangan 29 AWS di 13 provinsi (21 AWS tahun 2005 dan 8 AWS mulai 2006)</p>	BPPT				
		<p>German-Indonesia Tsunami Early Warning System (GI-TEWS) untuk Aceh dsk. 2 buah</p> <p>Fire Danger Rating System (FDRS)</p>	<p>Pemasangan 15 buah Buoy TEWS bantuan Pemerintah Jerman</p>	BPPT				
			<p>Pembangunan Early Warning System</p>	Dep. PU				
		<p>Penjajakan lokasi untuk penempatan alat dalam rangka TEWS</p>	<p>Penentuan lokasi peralatan TEWS</p>	BMG				
			<p>institusionalisasi dan diseminasi informasi peringatan ke setiap penduduk</p>	BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, DEPKES, PU (didukung BGR/GTZ Georisk Project)				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pengadaan perangkat soft ware dan hardware sistem peringatan dini	Bekerjasama dengan IFRC dan PNSs mengembangkan sistem peringatan dini secara nasional	PMI, BAKORNAS PB	■	■		
			Pembangunan dan Pengoperasian ITWS Asia Tenggara	BMG BAKOSURTANAL BPPT	■	■		
			Sistem Peringatan Dini Tsunami	LIPI DESDM	■	■	■	■
		Proses peninjauan dalam me-set up 8 seismographs untuk memonitor bencana letusan gunungapi	Project akan membiayai dan me-set up 8 seismographs yang akan di deploy di NTB, dan NTT	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	
		Membentuk alur informasi peringatan dini gunung api dari pos pengamat gunung api-PVMBG-Pemda-Masyarakat, bandara terdekat juga asosiasi keselamatan penerbangan sipil, dituangkan dalam SOP. Mengirimkan informasi wilayah-wilayah yang berpotensi longsor kepada Pemda	Membentuk alur informasi peringatan dini gunung api dari pos pengamat gunung api-PVMBG-Pemda-Masyarakat, bandara terdekat juga asosiasi keselamatan penerbangan sipil, dituangkan dalam SOP. Mengirimkan informasi wilayah-wilayah yang berpotensi longsor kepada Pemda	DESDM	■	■	■	■
		Mendukung BMG dalam peninjauan lokasi utk penempatan alat dalam rangka TEWS (UNESCO - ERTR UNDP Project)	Penentuan lokasi peralatan TEWS	BMG	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Mendukung BMG dalam pembangunan sistem peringatan dini gempa dan tsunami (UNESCO - ERTR UNDP Project)	Pembangunan sistem peringatan dini tsunami (lanjutan)	UNESCO BMG	■			
		Rencana	Monitoring kondisi pangan, nutrisi dan mata pencaharian di Indonesia (tahap pertama akan dilaksanakan di NTT dan NTB)	WFP, DEPKES, DEPTAN, BKKBN	■	■	■	■
		Pembuatan buletin sistem peringatan dini (Prediksi curah hujan, prediksi banjir, monitoring kebakaran hutan, perimbangan pangan dll) (bulanan/periodik)	Melanjutkan pembuatan buletin sistem peringatan dini	WFP, LAPAN, BMG	■	■	■	■
		Pembuatan buletin sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana alam (Prediksi curah hujan, prediksi banjir, monitoring kebakaran hutan, perimbangan pangan dll) (bulanan/periodik)	Melanjutkan pembuatan buletin sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana alam	WFP, LAPAN	■	■		
		Penguatan radio komunitas untuk sistem peringatan dini di wilayah rawan letusan gunungapi (Merapi)	Penguatan radio komunitas untuk sistem peringatan dini di wilayah rawan letusan gunungapi (NTT) dan rawan	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Radio siaran swasta niaga UNISI program layanan masyarakat	Pengembangan program khusus peringatan dini risiko bencana	CDS-Ull bekerjasama dengan UNISI, Depkominfo, Lembaga Nasional dan Internasional				
			Deployment buoy Instalasi tide-gauge	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				
			Melakukan simulasi evakuasi gempa dan tsunami	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				
		Identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan	Pengembangan decision support systems	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				
			Pengembangan support system komunikasi peringatan dini risiko bencana berbasis komunitas	CDS-Ull bekerjasama dengan UNISI, Depkominfo, Lembaga Nasional dan Internasional				
			Pengembangan jaringan accelerometer	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Pengembangan jaringan tide gauge	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■	■	
			Pengembangan jaringan DART buoy	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■	■	
			Pengembangan jaringan monitoring deformasi (GPS)	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■	■	
		Penyusunan TEWS	Emergency Command and Control Aceh (ECCA)	PEMDA NAD, KEMENEG RISTEK, PRTMB			■	■
			Melakukan integrasi sistem ICT	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■		■
			Melakukan studi karakteristik tsunamigenik					
			Melakukan studi karakteristik kegempaan					
	Sistem Evakuasi Bencana Tsunami		Penyusunan model evakuasi bencana meliputi lokasi evakuasi dan jalur evakuasi Simulasi lapangan	Lembaga Pengabdian Masyarakat UNHAS			■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Sosialisasi PRB untuk Kawasan Pesisir dan Sungai	Pembentukan kelompok mediator pada masyarakat Pelatihan Mitigasi Bencana Pelaksanaan simulasi dan kegiatan lapangan	Lembaga Pengabdian Masyarakat UNHAS				
e.	Melakukan review dan menjaga sistem informasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini.	Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular (SKD Penyakit Menular) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Penyusunan kerangka komunikasi Rehabilitasi software/hardware	Tetap menjaga agar Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi tetap berjalan Perbaikan sistem komunikasi dan informasi	DEPKES BMG				
		Penguatan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi PB Bansos yang telah dilakukan saat ini baru membangun "sistem"nya dan bukan isinya karena keterbatasan sarana pendukung terutama teknologi dan modelnya	Memperkuat dan memperluas kerjasama tentang jaringan informasi dengan berbagai unsur terutama terhadap sistem dan metodenya Menyiapkan sarana teknologi informasi	DEPSOS				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Adanya keterbatasan kemampuan untuk mengeksplorasi isi dari ketentuan, pedoman tentang kebijakan dan program PB Bansos dalam bentuk buku  Adanya keterbatasan sarana/peralatan dan kemampuan mengeksplorasi materi/informasi komunikasi masyarakat  Update data base dan statistik bencana di PMI di semua tingkatan (Pusat, Daerah dan Cabang)  Pemasangan dan pemantauan GPS, Pasut, evaluasi geodinamika	Mengintegrasikan akses-akses melalui pertemuan-pertemuan berkala dan pelatihan-pelatihan bersama.  Meningkatkan mutu materi publikasi  Melakukan revisi dan Update database dan statistik bencana di PMI di semua tingkatan (Pusat, Daerah dan Cabang).  Pemasangan dan pemantauan GPS, Pasut, evaluasi geodinamika	DEPSOS	■			
			Pemanfaatan Teknologi Inderaja, SIG dan GPS Untuk Sensus Sosial Ekonomi Daerah Rawan Bencana	BAKOSURTANAL dan instansi terkait	■	■	■	■
f.	Penguatan kapasitas institusi pengelola sistem peringatan dini	Tersusunnya draft Juklak Sistem Peringatan Dini yang berbasis masyarakat.	Mengintegrasikan dan menerapkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat di semua desa/kelurahan yang telah menjalankan program KBBM dan PERTAMA	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Penguatan kapasitas institusi pengelola sistem peringatan dini	LAPAN, Dep. PU	■	■	■	
	Dalam penyiapan Sistem peringatan dini pada Tsunami (komponen kapasitas building) GTZ- Pusat Sedang dalam proses peninjauan dan pengumpulan informasi terkait	Koordinasi dari Kelompok kerja VI dari TEWS project		GTZ, KEMENEG RISTEK dan instansi terkait lainnya	■	■	■	
		Dalam pengukuran pendeteksian stabilitas gerakan tanah, alat ukur akan digunakan. Comprehensive training akan diberikan ke instansi terkait (Badan Geologi: Pusat Lingkungan Geologi)		BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	
	Mendukung BMG dalam Pelatihan Sistem Operasi Peringatan Tsunami di Pacific Tsunami Warning Centre, Hawaii, USA		Mendukung pelaksanaan Training of Trainers untuk staf BMG di Indonesia mengenai Sistem Operasi Peringatan Tsunami	UNESCO BMG	■			
	Tersedianya skenario besar sistem peringatan dini tsunami		Pemutakhiran grand-scenario tsunami early warning syatem (TEWS)	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	■
			Pengembangan sistem diseminasi dan informasi tsunami	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
g	Memperkuat koordinasi dan kerjasama multisektor dan multistakeholder dalam rantai sistem peringatan dini	Membentuk alur informasi peringatan dini gunung api dari pos pengamat gunung api-DVMBG-Pemda-Masyarakat, bandara terdekat juga asosiasi keselamatan penerbangan sipil, dituangkan dalam SOP. Mengirimkan informasi wilayah-wilayah yang berpotensi longsor kpd Pemda	Membentuk alur informasi peringatan dini gunung api dari pos pengamat gunung api-DVMBG-Pemda-Masyarakat, bandara terdekat juga asosiasi keselamatan penerbangan sipil, dituangkan dalam SOP.	DESDM, Pemda terkait	■	■		
		Belum ada sistem yang handal dalam informasi peringatan dini	Memperkuat koordinasi antar sektor dalam peringatan dini multi sektor Men-set-up jejaring untuk peringatan dini	BAKORNAS PB	■	■	■	
				BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, DEPKES, Dep. PU (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■			

















No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan		
					2006	2007	2008
		Penjajakan proses dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi data dan statistik bencana	Membantu dalam proses penguatan instansi yang terkait (Badan Geologi), contoh; seismograp dpt diintegrasikan ke dalam jaringan nasional monitoring gunungapi dan mendefine bagaimana nantinya kontribusi mereka dalam usaha-usaha peringatan dini di Indonesia	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM			
		Penguatan kerjasama dengan institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam memonitor, mengkaji, dan membangun sistem kesiapan dini bencana.	Penguatan kerjasama dengan institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam memonitor, mengkaji, dan membangun sistem kesiapan dini bencana.	OCHA, DESDM, BMG			
		Penguatan kerjasama dengan institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengkaji, dan membangun sistem kesiapan dini bencana.	Penguatan kerjasama dengan institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengkaji, dan membangun sistem kesiapan dini bencana.	OCHA			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
h	Menciptakan dan memperkuat sistem peringatan dini yang efektif pada pulau-pulau kecil							
i	Mendukung pembangunan infrastruktur dan kapasitas ilmiah untuk melakukan penelitian	Inventarisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain	Melanjutkan inventarisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam PK-MKL	DEPKES				
			Peningkatan kapasitas institusi/ kelembagaan dan pendanaan dengan meningkatkan promosi/ kerjasama dalam dan luar negeri	UGM				
		Pemasangan dan pemantauan GPS, Pasut, evaluasi geodinamika	Pemasangan dan pemantauan GPS, Pasut, evaluasi geodinamika	BAKOSURTANAL dan instansi terkait				
j	Mendukung pengembangan dan perbaikan database		Pengembangan direktori umum untuk bencana yang dibutuhkan dalam situasi darurat	OCHA bersama Badan PBB lain, instansi terkait				
			Pengembangan dan pembaruan database untuk : Daftar kontak SATLAK dan SATKORLAK di Indonesia	OCHA, BAKORNAS PB, SATKORLAK PB, SATLAK PB				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Daftar kontak mereka yang bekerja dalam penanganan bencana dari komunitas internasional di Indonesia					
		Penyusunan database kejadian dan jumlah korban bencana geologi	Pemutakhiran database kejadian dan jumlah bencana geologi	DESDM				
		Penyusunan database kejadian dan jumlah korban serta kerugian bencana banjir	Pemutakhiran database kejadian dan jumlah korban dan kerugian bencana banjir	Dep. PU				
		Rencana	Pengembangan data base, analisis statistik kejadian bencana, akibat dan kerugiannya	CDS-UII bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
		Penyediaan dan pengelolaan data geospasial, mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NAD	Pengelolaan data geospasial mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NAD	DKP				
k	Mendukung perbaikan metode ilmiah		Pemodelan struktur pengurangan risiko bencana teknologi/industri lingkungan di Kota Surabaya	ITS				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Penyusunan pedoman rapid damage assessment	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■	■	
			Pemodelan potensi bahaya tsunami (zonasi)	BPPT	■	■		
I	Membangun dan memperkuat kapasitas dan pertukaran informasi statistik	Penguatan kapasitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi data dan statistik bencana melalui laporan bulanan yang dikirimkan ke instansi terkait serta website	Penguatan kapasitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi data dan statistik bencana melalui laporan bulanan ke instansi terkait dan website	LAPAN	■	■	■	■
		Membantu Menyusun Konsep Manajemen Risiko Bencana Berbasis Masyarakat yang dapat diadopsi di seluruh wilayah Indonesia	Pertukaran data dan pengetahuan kebencanaan	BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, DEPKES, Dep. PU (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■			
	Persiapan pembuatan modul pelatihan untuk pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran data		Peningkatan kapasitas pengumpulan data dampak bencana untuk standarisasi di beberapa provinsi tertentu	Oxfam, SATKORLAK PB	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
m	Mengumpulkan dan standarisasi informasi statistik risiko dan dampak kerugian bencana	Standarisasi informasi data dan statistik risiko, akibat dan kerugian bencana pada skala regional melalui kerjasama dengan instansi terkait	Standarisasi informasi data dan statistik risiko, akibat dan kerugian bencana pada skala regional melalui kerjasama dengan instansi terkait	LAPAN	■	■		
		Standarisasi pelaporan kejadian tanah longsor dari daerah ke pusat, standarisasi pemetaan rawan bencana gerakan tanah, standarisasi pemetaan kawasan rawan bencana gunungapi	Standarisasi istilah kebencanaan	DESDM	■			
		Standarisasi dalam reporting, mapping kejadian-kejadian bencana	Work out sebuah metode guna standarisasi dan harmonisasi informasi data dan statistik risiko, akibat dan kerugian bencana pada skala regional, bekerja sama, berbagi informasi dengan pihak asuransi yang telah melakukan perhitungan	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	
		Persiapan pembuatan alat untuk standarisasi data dan informasi	Pengenalan alat, melengkapi data yang ada dan penerapan alat	Oxfam, BAKORNAS PB, SATKORLAK PB, SATLAK	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Sosialisasi dan penyusunan buku tentang bencana kebakaran pada gedung-gedung vital dan bangunan tinggi	Penyusunan standarisasi penyelamatan dan pengamanan gedung-gedung utama	Dep PU, UNHAS				
		Pengembangan Mobile Crisis Center	Rapid Assessment Bencana di Indonesia	BPPT				
n	Melakukan kerjasama tingkat regional dan internasional		Mengembangkan operation centre dengan Perancis	BAKORNAS PB				
		Penggalangan kegiatan kerjasama internasional	Mengembangkan operation centre dengan Jepang					
		Penggalangan kegiatan kerjasama internasional	Penggalangan potensi kerjasama internasional	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait				
		Telah ditandatangani MoU kerjasama dengan Jerman, Jepang, Amerika, dan Perancis	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendampingan kerjasama	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait				
		Semi loka/FGD tentang penyelenggaraan perumahan swadaya berkaitan dengan permukiman di wilayah pesisir	Peningkatan kerjasama melalui edukasi (training, lokakarya) antar instansi, perguruan tinggi dan LSM	UNHAS, FT-ARSI/PWK				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
0	Penelitian analisis dan laporan perubahan jangka panjang dan isu peningkatan kerentanan dan risiko bencana	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami	Identifikasi Kapasitas Daerah Dalam Manajemen Bencana	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■			
		Penyusunan statistik gempa dan tsunami	Studi analisis risiko akibat gempa/tsunami	BMG	■			
			Identifikasi kearifan lokal	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	■
		Pengembangan peringatan dini banjir dan longsor	Studi karakteristik banjir bandang Korelasi intensitas hujan dan pemicu tanah longsor	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	
		Pengembangan peringatan dini kekeringan dan kebakaran hutan	Implementasi model intensitas curah hujan lokal Kajian karakteristik hujan	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	
			Studi/penelitian pemicu terjadinya bahaya kebakaran hutan	UNHAS		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Metode ilmiah yang sudah diimplementasikan	Pemodelan pendekatan kombinasi metode ilmiah dan kearifan lokal	CDS-UII bekerjasama dengan praktisi lokal dan overseas practitioners				
		Pemahaman dan karakterisasi deformasi kerak bumi sepanjang kepulauan Mentawai dan Pesisir barat Sumatera	Pengamatan deformasi kerak bumi melalui pengukuran GPS permanen (total 30 unit)	LPI-Caltech (ITB)				
		Identifikasi jejak tsunami masa lalu sebagai alat untuk mitigasi bencana tsunami	Pengamatan tsunami purba di daerah Padang, Bengkulu, Pangandaran	Geoteknologi-LPI				
			Rencana kegiatan penelitian tsunami purba daerah Banda Aceh-Meulaboh; Bengkulu, Banyuwangi, Maumere	Geoteknologi-LPI				
		Pemahaman bencana ikutan akibat gempa bumi sebagai masukan dalam penataan kawasan dan perencanaan tata kota	Penelitian likifaksi akibat gempa bumi di kota Padang, Aceh dan Yogyakarta	Geoteknologi-LPI				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Rencana penelitian potensi likifikasi di Banda Aceh, Meulaboh, Padang, Banyuwangi dan Maumere	Geoteknologi-LIPI		■		
		Model dan mitigasi Bencana Tsunami letusan gunungapi di Selat Sunda	Identifikasi relik tsunami purba di perairan dan pesisir barat dan selatan Sumatra.	Geoteknologi-LIPI	■			
		Kajian kondisi infrastruktur daqlam kaitannya dengan gempa bumi	Rencana penelitian kondisi infrastruktur di Banda Aceh, Meulaboh, Padang, Banyuwangi dan Maumere	Geoteknologi-LIPI		■		
		Kondisi kualitas air tanah dan air permukaan paska tsunami	Kajian kondisi kualitas air tanah dan air permukaan di Banda Aceh	Geoteknologi - LIPI	■			
			Rencana penelitian kondisi sosio ekonomi masyarakat rawan bencana di Banda Aceh, Meulaboh, Padang, Banyuwangi dan Maumere	Geoteknologi-LIPI		■		
		Pemetaan kawasan perairan paska tsunami	Penelitian dan pemetaan kawasan perairan utara Banda Aceh, barat Lho Kruet dan utara Simeulue	Oseanografi-LIPI Norwegia	■			
		Pemahaman deformasi kerak bumi dalam upaya mitigasi bencana	Rencana studi GPS dalam memahami deformasi kerak bumi di Jabar dan NAD	JSPS-LIPI-ITB		■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pemahaman kegiatan seismologi masa lalu dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi	Rencana studi paleoseismologi di kawasan pesisir dan daratan Sumatera	JSPS-LIPI		■		
		Pemahaman rekaman tsunami masa lalu dan pemodelan tsunami	Rencana studi paleotsunami dan pemodelan tsunami	JSPS-LIPI-ITB		■		
		Pemahaman aspek strok motion dan geologi teknik dalam upaya mitigasi bencana	Rencana kajian strong motion dan implikasinya terhadap aspek geologi teknik	JSPS-LIPI-ITB		■		
		Kondisi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Rencana kajian Kondisi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di NAD	JSPS-LIPI-ITB		■		
		Kebutuhan desain komunikasi radio bencana dan cara penyelamatan yang mudah dipahami oleh penduduk pada daerah berisiko tinggi	Riset komunikasi pada target audience design Komunikasi berdasarkan hasil riset peluncuran communication tools kepada target audience	CDS-UUI bekerjasama dengan Prodi komunikasi dan overseas practitioners		■	■	■
		Rencana penelitian bersama dengan RCUSS - Kobe University - Nippon Koe	Melakukan penelitian bersama simulasi escape road/building/hill pada daerah rawan bencana Tsunami	PRTMB		■	■	■
			Riset untuk perencanaan manajemen kawasan historis pesisir, rawan banjir dan abrasi	UNHAS, FT-ARSI/PWK		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penelitian Teknis untuk Mendukung Penyusunan RTRP, Regulasi untuk IMB dan Prototipe Bangunan Masyarakat yang Tahan Gempa dan Tsunami	Penelitian peredaman tsunami dengan penataan bangunan permanen  Perintisan model rumah sebagai prototipe bangunan tahan gempa dan tsunami	PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) UNIHAS				
3	Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan							
a	Pengembangan informasi risiko bencana dan cara penyelamatan yang mudah dipahami oleh penduduk pada daerah ber-risiko tinggi	Melakukan sosialisasi tentang penanganan/penanggulangan mitigasi bencana geologi kepada masyarakat dan aparat Pemda serta menyelenggarakan peringatan dini (dalam letusan gunung api dan bencana gerakan tanah), penyebarluasan poster, leaflet dan buku saku bencana geologi	Penambahan jumlah daerah yang disosialisasikan dan dilatih tentang penanganan/ penanggulangan dan mitigasi bencana geologi	DESDM				
		Brosur-brosur dan poster cara menghadapi gempa bumi (IUDMP 1999)	Pengembangan informasi dalam bentuk brosur dan poster untuk masyarakat dalam menurunkan risiko bencana	ITB				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Di sekolah belum tersedia sarana informasi risiko bencana	Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana informasi risiko bencana terutama di daerah rawan konflik	DEPDIKNAS	■	■	■	
		Penerbitan dan penyebaran buku saku, leaflet, dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah	Memaksimalkan dan menambah jumlah penyebaran buku saku, leaflet dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah di daerah rawan bencana geologi	DESDM, BMG	■	■	■	■
			Pembuatan sketsa dan gambar penyelamatan bencana alam	Dep.PU	■	■		
		Menyusun buku tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah	Menyusun buku tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah	DESDM	■			
		Menyusun konsep Decentralized Conflict sensitive Planning (DCSP) kerjasama dengan UNDP	Pertukaran Informasi tentang DCSP	BAPPENAS	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pembuatan peta BKRK (Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas) dengan pendekatan partisipatif di semua desa dan kelurahan area pilot program KBMM dan PERTAMA.	Penggunaan peta BKRK untuk kebutuhan penyadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko, termasuk untuk penentuan jalur-jalur evakuasi.	PMI				
		Menyusun draft silabus, modul dan buku panduan - Penyadaran kesiapsiagaan bencana dan upaya pengurangan risiko melalui pendekatan pendidikan ke-trampilan hidup untuk PMR Mula (SD), PMR Madia (SLTP) dan PMR Wira (SLTA) serta KSR Unit Perguruan Tinggi (2005)	Mencetak, sosialisasi, dan diseminasi Penyadaran kesiapsiagaan bencana dan upaya pengurangan risiko melalui pendekatan pendidikan ke-trampilan hidup untuk PMR Mula (SD), PMR Madia (SLTP) dan PMR Wira (SLTA) serta KSR Unit Perguruan Tinggi.	PMI				
		Penyebaran melalui media cetak (poster, leaflet) dan juga melalui media komunikasi oral, di mana pendekatan-pendekatan telah dilakukan terlebih dahulu sehingga penerimaan masyarakat baik, tanpa mengabaikan tradisi yang ada di daerah tersebut	Mereview dan mengoptimalkan metode yang sudah ada	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penyusunan langkah-langkah penyelamatan dalam bencana gempa di Kabupaten Siberut Selatan (terdapat dlm bahasa Indonesia dan Mentawai)	Dokumentasi lembar informasi dalam bentuk formal sehingga dapat disebarakan ke komunitas lain	UNESCO Co-Management Siberut	■			
		Rencana	Perbanyak materi pengetahuan mengenai bencana gempa dan tsunami di kalangan masyarakat umum	UNESCO Geoteknologi LIPI	■			
			1.Pembuatan sistem informasi proteksi kebakaran 2.Pembuatan sistem informasi bencana teknologi	ITS	■			
			Peningkatan kesadaran untuk mengubah Tingkahlaku: Pengembangan Pengetahuan, informasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian	UNICEF, BAKORNAS PB, DEPDAGRI, DEPKES, DEPSOS, BKKBN, Dep. PU, KEMENKO KESRA, DEPKUMHAM, Kejaksanaan, POLRI,	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
				DEPPERIN, DEPdag, DEPKOMINFO, BPS, KEMENEG PP, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot				
		Kajian linguistik dan geologi kebijakan budaya lokal dalam pemahaman gempa bumi dan tsunami	Pemahaman budaya smong dalam pengurangan dampak gempa dan tsunami di Simeuleu	LIPI-UNESCO	■			
			Pengembangan waduk resapan	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	
		Koordinasi dan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi	Pengembangan wawasan bencana kebaharian di wilayah KTI	UNHAS		■	■	
b	Penguatan jaringan ahli bencana dan institusi terkait baik antar sektor maupun antar-region	Belum tersedianya jaringan bagi tenaga ahli bencana di perguruan tinggi dengan instansi terkait	Mengupayakan agar di setiap perguruan tinggi di daerah rawan bencana terbentuk jaringan komunikasi ahli bencana	DEPKINAS	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi (bimbingan mahasiswa dan penelitian bersama) dan intitusi lainnya di dalam dan luar negeri	Koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya di dalam dan luar negeri	DESDM	■	■	■	■
		Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	DESDM	■	■	■	■
			Memperkuat jaringan kerjasama antar institusi dalam dan luar negeri tentang aspek kebencanaan	UGM	■	■	■	■
		Meningkatkan kemitraan dan jejaring dengan mitra nasional maupun internasional.	Memperkuat dan memelihara kemitraan dan jejaring dalam penanganan bencana  Mengadakan pertemuan rutin dengan mitra kerja nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kerjasama dalam program KBBM dan PERTAMA	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Membuat jaringan seluas- luasnya dengan institusi terkait, lembaga- lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	Membuat jaringan seluas- luasnya dengan institusi terkait, lembaga lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	DESDM	■	■	■	■
		Sedang dalam proses perencanaan	Mengadakan Lokakarya, para pemangku kepentingan (Badan Geologi, DESDM, BAKORNAS PB, RISTEK, LIPI, BPPT, LAPAN, BMG, DEPDAGRI, DESDM, DEPSOS, PU, DEPKES, Perguruan Tinggi dan LSM, BGR-GTZ) untuk koordinasi dan kerjasama	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■			
		Kebutuhan jejaring tenaga ahli bencana di tingkat provinsi	Pembentukan jejaring tenaga ahli bencana di tingkat provinsi	CDS-Ull bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional	■	■	■	■
		Telah dibentuk dewan pakar beranggotakan 30 orang yang bertarbelakang disiplin ilmu dan keahlian yang beragam	Meningkatkan intensitas pertemuan-pertemuan dengan berbagai unsur PB Bansos melalui lokakarya dan pelatihan	KLH, DEPSOS	■		■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Koordinasi program riset untuk provinsi NAD	Capacity building S2-S3	KEMENEG RISTEK dan PRTMB				
		Kebutuhan untuk dibentuknya Board Committee Risiko Bencana dan Kerentanan untuk DIY dan Jateng	Pembentukan board committee risiko bencana dan kerentanan, penyusunan dan pelaksanaan program komite	CDS-Ull bekerjasama dengan ilmuwan bencana dan praktisi				
		Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	DKP				
			Memperkuat jaringan kerjasama antar institusi dalam dan luar negeri tentang aspek kebencanaan	DKP				
c	Peningkatan kerjasama dan komunikasi di antara para ilmuwan dan praktisi bencana	Standar pelayanan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit saat ini masih di bawah standar, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan	Revisi pedoman / Standar Gawat Darurat Rumah Sakit dalam menghadapi bencana (Alam, Kimia, Biologi, Nuklir, man made disaster)	DEPKES (Yanmedik)				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Sosialisasi pedoman / Standar Gawat Darurat Rumah Sakit dalam menghadapi bencana (Alam, Kimia, Biologi, Nuklir, man made disaster)		■			
		Pembentukan Steering Committee Emergency and Health Problem	Menyelenggarakan pertemuan profesi secara rutin (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	DEPKES (Yanmedik)	■	■	■	■
		Belum tersedianya wadah kerjasama dan komunikasi penanggulangan bencana	Mendorong dan memfasilitasi kerjasama ilmuwan di perguruan tinggi dan praktisi	DEPDIKNAS	■	■	■	■
		Partisipasi dalam seminar, lokakarya, pameran yang berkaitan dengan bencana geologi di dalam dan luar negeri	Menyelenggarakan seminar, lokakarya, pameran yang berkaitan dengan bencana geologi	DESDM	■	■	■	■
		Wokshop Internasional bidang gunungapi pada September 2006 di Yogyakarta, joint program dengan Volcano International Gathering UPN	Tukar informasi hasil penelitian dan membicarakan rencana kerjasama di bidang kegunungapian di masa mendatang	DESDM	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	Membuat jaringan seluas-luasnya dengan institusi terkait, lembaga-lembaga penelitian, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri	DESDM	■	■	■	■
		Pertemuan evaluasi PK-MKL setiap tahun	Tetap melanjutkan kegiatan pertemuan evaluasi PK-MKL setiap tahun	DEPKES	■	■	■	■
		Jejaring rujukan medik saat ini belum optimal (order in chaos)	Penguatan jejaring rujukan medik emergency dan bencana baik pra hospital dan hospital	DEPKES (Yanmedik)	■	■	■	■
		Riset/Penyusunan Management Plan Daerah Kritis Ekosistem (Dieng, Rawa Pening, Rawa Biru, Papua, Danau Toba, Waduk Wonogiri, dll)  Penyusunan Grand Design Pengelolaan SDA dan LH DAS Bengawan Solo, Pemali-Comal, Jratun Seluma, Bogowonto, Progo, dll)  Penyusunan Peta Rencana Detail Pengelolaan LH dan Bencana Alam DAS Solo Hulu.	Peningkatan kerjasama melalui promosi dan edukasi training	UGM	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Meeting reguler dilakukan untuk me-update dan saling tukar informasi mutakhir paper-paper ilmiah, dimana pengelolaan bencana mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang mendukung keterkaitannya, seperti isu pengembangan di bidang rencana tata ruang di urban dan regional, kemiskinan dan isu gender	Menguatkan suatu jalinan kerjasama dgn melibatkan para ilmuwan dan praktisi bencana dalam konferensi internasional (EWC III di Bonn) dan turut berpartisipasi dlm seminar-seminar ilmiah di dlm negeri di bidang geologi dan kebencanaan	BGR/GTZ (Georisk Project)	■	■		
		Terlibatnya UNESCO dalam United Nations Technical Working Group on Disaster Risk Reduction (UNTWG DRR)	Pengumpulan sumber daya dari masing-masing badan PBB untuk diserahkan kepada pihak yang terkena bencana melalui koordinasi dengan UN - OCHA	Badan-badan PBB , Institusi Pemerintah, LSM lokal dan internasional	■			
		Ikut berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, pameran yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana	Ikut berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, pameran yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana	Badan PBB, Institusi Pemerintah, LSM lokal dan internasional	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penguatan kapasitas pemerintah terkait misalnya BAKOSURTANAL, BPS, BAKORNAS dan pemerintah daerah dalam hal database kesiapan menghadapi bencana dan pemetaannya	Pembuatan database kesiapan menghadapi bencana  Sosialisasi dan pelatihan pemeliharaan dan pemanfaatan database bencana ke tingkat provinsi	WFP dan instansi terkait	■	■		
		Pembentukan dan pengembangan jaringan kerjasama dan komunikasi (KOMPAK - Kerjasama Organisasi Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan)	Membangkitkan kembali jaringan kerjasama dan komunikasi	PMB-ITB bekerjasama dengan MPBI	■		■	■
		Penyelenggaraan Lokakarya Pengurangan Risiko Bencana	Penyelenggaraan lokakarya secara berkala tentang pengurangan risiko bencana	BRR, Institusi Pemerintah, Badan PBB, LSM Lokal dan Internasional	■			
			Seminar internasional tentang manajemen bencana	ITS		■	■	■
		Lokakarya internasional 6-7 Desember 2006	Melaksanakan kegiatan rutin tahunan setiap 6-7 Desember	KEMENEG RISTEK -PRTMB - Kobe University		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Membangun kolaborasi dengan pihak berkompeten di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas ilmiah dan teknis	CDS-UJI bekerjasama dengan LSM lokal, nasional dan internasional				
		Inisiasi media cetak, elektronik dan interaktif untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap bencana	Membentuk Media Board Committee untuk kampanye kebencanaan dan usaha pengurangan risiko bencana	CDS-UJI bekerjasama dengan Media Group Enterprise, Prodi Komunikasi dan overseas practisioner				
		Misi kelembagaan masih paska disaster oriented, membatasi cakupan pada bencana geologi dan tsunami	Penyelenggaraan Konferensi, Seminar, Lokakarya dan kegiatan sejenis di tingkat lokal, nasional dan internasional	CDS-UJI bekerjasama dengan CEEDEDS, Lembaga Nasional dan Internasional				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Need Assessment, Lokakarya persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan bale daya perumahan dan stakeholder	MENPERA		■		
d	Peningkatan pemanfaatan informasi, komunikasi dan teknologi dirgantara dalam PRB	Sedang dilaksanakan (Kerjasama dengan instansi terkait seperti BAKORNAS PB, KLH, DEPTAN, Dephut, LIPI, dll)	Pemanfaatan teknologi dirgantara dalam penanganan bencana	LAPAN	■	■	■	■
		Penyediaan dan pengelolaan data geospasial mendukung rehabilitasi dan Nias mendukung BRR NAD dan Nias	Pengelolaan data geospasial mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias mendukung BRR NAD dan Nias		■	■		
		Atlas Tsunami Aceh	Penyusunan atlas nasional		■	■		
			Pengembangan SIPBI (Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia)					
		Akan dilakukan pembuatan sistem informasi melalui website Ditjen Perhubungan Udara	Pengimplementasian sistem informasi (dilakukan secara bertahap)	DEPHUB	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pengembangan website	Pemanfaatan website PPK	DEPKES	■	■	■	■
		Pemanfaatan Sistem Informasi dan Komunikasi	Pemanfaatan Sistem Informasi dan Komunikasi					
		Sedang dilaksanakan (inventaris basis data penginderaan jauh multi resolusi untuk bencana)	Inventarisasi basis data penginderaan jauh multi resolusi untuk bencana	LAPAN	■	■	■	
		Tersedianya DMIS (Sistem Informasi Manajemen Bencana) di PMI dan telah berfungsi dengan baik.	Sharing informasi bencana dengan BAKORNAS, Pemerintah, ICRC, IFRC, Perhimpunan Nasional, LSM Nasional dan Internasional, Badan-badan PBB lainnya.	PMI	■	■	■	■
			Membuat jaringan data base untuk longsor dengan format standar dalam bentuk CD-Rom, penelitian longsor dengan laser scanning di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi dan Cianjur guna menentukan kemiringan lereng	BGR/GTZ (Georisk Project) -Badan Geologi / DESDM	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Utilitas Pusinfo-UJI untuk kebutuhan internal	Peningkatan utilitas Pusinfo UJI utk kebutuhan mitigasi bencana dan kompatibilitas dg teknologi kedirgantaraan untuk PRB	CDS-UJI bekerjasama dengan Pusinfo UJI, Prodi informatika, ilmuwan dan praktisi dan kedirgantaraan				
		Pengembangan sistem informasi dan komunikasi	Pemanfaatan sistem komunikasi radio	DEPHUB, DEPKOMINFO, ORARI, RAPI, ARRL - ITU				
		Penerbitan Jurnal Ilmiah: Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana	Penerbitan Jurnal Ilmiah: Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana	BPPT				
e	Pengembangan direktori, inventarisasi dan sistem pertukaran informasi yang mudah digunakan	Pengembangan Pusat Informasi Riset Nasional Mitigasi Bencana Alam (PIRBA)	Pengembangan Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Aceh	JICA, BAPPENAS, BRR				
			Penyempurnaan sistem Penginstitusionalisasian sebagai salah satu pusat informasi bencana di Indonesia	PMB-ITB, KEMENEG RISTEK, KOMINFO				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan		
					2006	2007	2008 2009
		Pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk fasilitator kegiatan "Community-based Disaster Management"	Implementasi kegiatan pelatihan CBDM melalui jaringan organisasi Pramuka di seluruh Indonesia	Yayasan IDEP	■		
		Penyempurnaan/pemutakhiran data untuk Direktori PB Bansos	Membuat dan menyebarluaskan Direktori PB Bansos	DEPSOS	■		
		Adanya desakan yang sangat kuat dari Kab/kota untuk pengembangan TAGANA beserta jaringannya sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia serta perlunya 'Payung Hukum' TAGANA	Meningkatkan Intensitas mutu dan jumlah pelatihan PB Berbasis Masyarakat melalui Tagana, TRC, Satgassos, Satgas Logistik, Posko di setiap Kab/Kota paling rawan bencana secara bertahap	DEPSOS	■		
		Saat ini jumlah personel PB Bansos yang terlatih di setiap provinsi adalah TAGANA 2.871 org; TRC 3.720; Logistik 75 org; Dumlap 1.790 org; Instruktur PB 1.860 org; Satgassos PB 3.900 org; dengan jumlah keseluruhan 15.291 org	Menyiapkan payung hukum TAGANA  Menyiapkan sarana dan peralatan pendukung operasional TAGANA berupa: Alat Dokumentasi dan Alat Audio Visual untuk penyuluhan  Melakukan sosialisasi ke berbagai pihak tentang eksistensi TAGANA melalui sarasehan, dll	DEPSOS	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
f	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana	Adanya leaflet, poster dan brosur mengenai kesiapan menghadapi bencana gempa	Mereproduksi materi-materi tersebut dan disebarluaskan kepada komunitas yang lebih luas untuk jenis bencana yang lain seperti tsunami, longsor, banjir dsb  Mengembangkan materi-materi tersebut	PMB-ITB kerjasama dengan lembaga donor nasional dan internasional  DKP				
		Sosialisasi Bencana Gunungapi, dan Tanah longsor di Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang gerakan tanah, dan kegungupian, khususnya bagi penduduk yang tinggal di dalam kawasan rawan bencana	DESDM				
		Sosialisasi Bencana Tsunami di provinsi Bengkulu	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang tsunami di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat di Provinsi Bengkulu	DESDM				
		Melakukan sosialisasi penanggulangan bencana geologi dan peringatan dini (dalam letusan gunung api dan bencana gerakan tanah) kepada masyarakat dan aparat Pemda	Penambahan jumlah daerah yang disosialisasikan dan dilatih tentang penanganan/ penanggulangan dan mitigasi bencana geologi	DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Menyusun buku tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah	Menyusun buku tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi/ tsunami dan gerakan tanah	DESDM	■	■	■	■
			Membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran melalui informasi dari sebab dan akibat dari bencana alam	BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■			
			Akan terus membuat brosur, poster stiker dan film untuk memberikan informasi kepada masyarakat	MPBI	■	■	■	
	Segmentasi dan Peluncuran alat-alat komunikasi		Produksi materi-materi komunikasi baik printing, electronic dan interaktif	CDS-UUI bekerjasama dengan Prodi Komunikasi dan overseas practisioner		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Adanya leaflet, poster dan brosur mengenai kesiapan menghadapi bencana gempa	Mereproduksi dan mengembangkan materi-materi tersebut dan disebarluaskan kepada komunitas yang lebih luas untuk jenis bencana yang lain seperti tsunami, longsor, banjir dsb.	DKP	■	■	■	■
		Sosialisasi bencana gempa bumi, tsunami dan cuaca	Memberikan informasi dan pengetahuan tentang kegempabumian, tsunami dan cuaca bagi penduduk yang tinggal di dalam daerah rawan bencana	BMG	■	■	■	■
		Memberikan akses kepada masyarakat dalam memahami proses alam, mitigasi bencana	Pameran Nasional Siaga bencana 2 di Kuta, Bali	LIPI-KEMENEG RISTEK	■			
		Memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat dalam memahami proses alam, mitigasi bencana	Rencana pameran di daerah di 4 lokasi: Bengkulu, Banten, Banyuwangi dan Maumere	LIPI		■		
			Rencana Pameran Nasional Sigap Bencana ke-3 di kota Padang	LIPI-Pemkot Padang-KOGAMIL		■		
		Fakta di lapangan membuktikan kekuatan konstruksi BARRATAGA dan RULINDA	Diseminasi Riset dan Pengembangan BARRATAGA dan RULINDA di tingkat Pusat, Daerah dan Masyarakat Rawan Bencana	CDS-Uli bekerjasama dengan CEEDEDS		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Buku Petunjuk Pelaksanaan Bangunan BARRATAGA	Penerbitan Edisi Revisi sebagai Buku Referensi Bidang Studi Manajemen Bencana	CDS-UII bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
			Pemberian informasi penyebab terjadinya kebakaran hutan, informasi daerah permukiman yang diperkirakan rawan terkena dampak kebakaran hutan	UNHAS				
		DKP pada tahun 2005 telah menyusun majalah kampanye kesadaran mitigasi bencana berupa komik yang dibagikan ke pelajar dan masyarakat. DKP merencanakan pelatihan untuk masyarakat	Kampanye melalui stiker, poster	DKP, Pers, Ormas, DEPDIKNAS, Pemda				
		Pembuatan sketsa dan gambar penyelamatan bencana alam	Pembuatan sketsa-sketsa berupa gambar kartun yang menarik, komunikatif dan mudah dipahami masyarakat	UNHAS				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Melakukan sosialisasi tentang pemahaman gempa bumi dan tsunami, mitigasi bencana geologi	Sosialisasi tentang pemahaman gempa bumi dan tsunami, mitigasi bencana kepada aparat pemda serta masyarakat kabupaten Kebumen pesisir, Jawa Tengah	UPT Balai informasi dan Konservasi Kebumihan	■			
g	Membuat dan menyebarkan terminologi internasional yang terkait dengan PRB	Di perpustakaan sekolah belum tersedia informasi istilah-istilah standar internasional dalam pengurangan risiko bencana	Di setiap perpustakaan sekolah akan diupayakan tersedia referensi istilah-istilah standar internasional dalam penanganan bencana	DEPKINAS	■	■	■	■
		Bekerjasama dengan institusi lain dan perguruan tinggi dalam membuat standarisasi istilah-istilah bencana geologi	Bekerjasama dengan institusi lain dan perguruan tinggi dalam membuat standarisasi istilah-istilah bencana geologi	DESDM	■	■	■	
		Istilah-istilah standar internasional dalam pengurangan risiko bencana telah dibuat	Sosialisasi akan dilakukan ke instansi-instansi terkait yang berkecimpung didalam penanganan bencana	BGR/GTZ (Georisk Project) -Badan Geologi/DESDM	■	■		
		Persiapan penyusunan bahan untuk sosialisasi istilah standar internasional dalam pengurangan risiko bencana	Pengembangan materi yang mudah dipahami dan digunakan	Oxfam, instansi terkait	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penyebarluasan Sphere Humanitarian Standar	Pelatihan, kampanye	MPBI	■	■	■	
		Penyediaan informasi tentang ancaman dalam buku saku gempa banjir dan tanah longsor, Hak-hak Perlindungan Pengungsi	Penerbitan buku Living with Risk, Buku Putih Penanganan Bencana	MPBI	■			
		Masih sedikit pelaku penanganan bencana yang memiliki pemahaman CBDRM	Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui pelatihan CBDRM	MPBI	■	■		
			Mengembangkan Web tentang penanganan bencana	MPBI	■	■	■	■
h	Memasukkan PRB dalam kurikulum sekolah, terutama untuk kaum muda dan anak-anak	Kurikulum pendidikan di sekolah belum mengakomodasikan pengetahuan risiko bencana	Penyesuaian kurikulum akan mengakomodasikan pengetahuan tentang penanganan risiko bencana	DEPDIKNAS	■	■		
			Pengembangan materi pengetahuan PRB untuk kurikulum sekolah	ITB UNESCO	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam hal penyadaran risiko dampak bencana bagi masyarakat di semua desa dan kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA	Implementasi pendidikan dan penyadaran risiko dampak bencana melalui pendidikan ketrampilian hidup bagi anggota masyarakat di daerah rawan bencana serta komunitas anak dan remaja di luar sekolah.	PMI				
		Pelatihan guru SD seluruh Indonesia (ToT) untuk kesiapan Sekolah Menghadapi Gempa bekerjasama dengan DEPDIKNAS	Earthquake School Safety Program di Provinsi NAD, kerjasama dengan UNCRD dan DEPDIKNAS, 2005-2006	PMB-ITB dan UNCRD				
			Memasukkan pengetahuan pengurangan bencana dalam kurikulum sekolah baik dalam pendidikan formal, non formal dan informal	MPBI, ITS, UNESCO				
		Adanya materi-materi/ kurikulum Program Kesiapan Sekolah terhadap Bahaya Gempa	Implementasi kurikulum program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa ke dalam kurikulum lokal	PMB-ITB kerjasama dengan DEPDIKNAS				
			Bekerja sama dengan Yayasan IDEP dan MPBI untuk memasukkan pengetahuan pengurangan bencana dalam kurikulum sekolah	UNESCO Yayasan IDEP dan MPBI				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penerapan mata kuliah manajemen bencana pada pendidikan geologi	Mengembangkan kurikulum manajemen bencana untuk diterapkan di bidang ilmu lain	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	■
		Penerapan Kuliah Kerja Nyata Tematis (manajemen bencana) bagi kawasan rawan bencana Aceh (2005), Jember dan Banjarnegara (2006)	Mengembangkan KKN Tematis di bnyak wilayah lain		■	■	■	
			Kursus bencana untuk guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan untuk umum	ITS	■			
		Kurikulum pendidikan tinggi, menengah/kejuruan dan pendidikan dasar belum mendukung pengetahuan risiko bencana dan kerentanan	Kajian dan pengembangan silaby bidang studi kebencanaan dan kerentanan untuk pendidikan tinggi, menengah/kejuruan dan pendidikan dasar	CDS-Ull bekerjasama dengan Prodi Pendidikan, DEPDIKNAS, Konsultan pendidikan kebencanaan dan kerentanan	■	■	■	■
		Belum ada mata kuliah umum tentang ilmu lingkungan	Pengenalan/pemberian materi/ mata kuliah tentang pelestarian/ kepedulian terhadap lingkungan pada semua bidang ilmu	UNHAS, FT-ARSI/PWK	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Belum ada materi ajar tentang pelestarian lingkungan dan pelatihan pada guru dan dosen	Pemberian materi ajar (wajib) tentang lingkungan (potensi dan masalah/ancaman) di tingkat lokal  Pelatihan secara rutin kepada guru dan dosen tentang mitigasi bencana yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemda setempat	UNHAS, FT-ARSI/PWK				
i	Implementasi pengkajian risiko dan kesiapan bencana di sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi	Memasukkan substansi PK-MKL pada materi kesehatan komunitas di Fak Kedokteran  Memasukkan materi Epidemiologi bencana pada kurikulum FKM  Membuka program Master (M.Sc Geo Information for Disaster Management kerjasama UGM-ITC Belanda)	Tetap melanjutkan upaya agar substansi atau materi PK-MKL masuk dalam kurikulum FK maupun FKM	DEPKES				
		Rencana	Melanjutkan program Master (M.Sc Geo Information for Disaster Management kerjasama UGM-ITC Belanda)  Bekerja sama dengan jaringan CLCC untuk mengimplementasi pengkajian risiko dan kesiapan bencana di sekolah	UGM  UNESCO-ED, UNICEF, DEPDIKNAS				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pelatihan guru SD di kawasan rawan letusan gunungapi (Merapi dan Egon) dan longsor (Kebumen dan Kulonprogo) bekerjasama dengan MPBI, UNDP	Pelatihan guru SD di kawasan rawan letusan gunungapi dan longsor di wilayah lain	UPN Veteran Yogyakarta	■	■		
		Penyusunan materi program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa untuk tingkat SD yang dapat dijadikan sebagai kurikulum ekstrakurikuler	Sosialisasi materi program kepada guru-guru di seluruh Indonesia melalui kegiatan ToT	PMB-ITB kerjasama dengan DEPDIKNAS	■	■	■	■
			Membuka short course dalam bidang mitigasi bencana	ITB, UNU, PEMDA-PEMDA		■	■	■
			Membuka Program Magister Disaster Management	Paska Sarjana UII, DEPDIKNAS dan Institusi Pendidikan Manajemen Keunggulan Internasional		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Pengembangan Radio Stream dengan internet teknologi untuk membangun komunikasi interaktif dengan stakeholder	CDS-UII bekerjasama dengan UNISI, DEPKOMINFO, Lembaga Nasional dan Internasional				
J	Implementasi program dan kegiatan di sekolah untuk belajar meminimalisasi efek bencana	Di setiap sekolah dan perguruan tinggi belum dilaksanakan pengkajian risiko dan kesiapsiagaan bencana	Memfasilitasi pengkajian risiko bersama-sama dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah dan Dewan Pendidikan	DEPDIKNAS				
		Jadwal pelajaran sudah padat dan tidak memungkinkan implementasi program dan kegiatan di sekolah	Memfasilitasi dan mendorong Dinas Pendidikan menyusun kebijakan teknis untuk melaksanakan program dan kegiatan baik kurikulum maupun ekstra kurikulum	DEPDIKNAS				
		Belum tersedia program pendidikan dan pelatihan di sekolah	Memfasilitasi Dinas Pendidikan untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan penanganan risiko bencana	DEPDIKNAS				
		Adanya materi-materi/ kurikulum Program Kesiapan Sekolah terhadap Bahaya Gempa	Implementasi kurikulum program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa ke dalam kurikulum lokal	ITB kerjasama dengan DIKNAS				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Belum tersedianya Laboratorium risiko bencana	Pengembangan laboratorium risiko bencana di pendidikan tinggi dan menengah	CDS-Ull bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
		Belum tersedianya Laboratorium risiko bencana	Pengembangan Laboratorium risiko bencana di Pendidikan Tinggi dan Menengah	CDS-Ull bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
		Misi kelembagaan masih paska disaster oriented, membatasi cakupan pada bencana geologi dan tsunami	Pengembangan sarana perpustakaan untuk kegiatan riset dan studi kebencanaan dalam bentuk buku teks, materi multi media dan data base	CDS-Ull bekerjasama dengan CEEDEDS, Lembaga Nasional dan Internasional				
k	Program pendidikan dan pelatihan PRB utk sektor tertentu (perencana dan pengelola kebencanaan)	Memberikan pelatihan untuk pelatihan (ToT) di tingkat provinsi dan kabupaten tentang bencana geologi	Meningkatkan sumber daya manusia dan jumlah daerah yang dilatih	DESDM				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Kerjasama penelitian dengan Dinas Geologi Jerman (BGR) di bidang gunungapi	Melakukan penelitian bersama di G. Anak Krakatau	DESDM	■			
		Kerjasama penelitian dengan Disaster Prevention Reduction Institute, Kyoto University, Japan di bidang gunungapi	Melakukan penelitian bersama dan instalasi peralatan seismik dan deformasi di G. Semeru, Bromo, dan G. Lamongan dalam rangka persiapan pembentukan kantor Regional Vulkanologi di Jawa Timur	DESDM	■	■	■	■
		Pelatihan secara rutin pengamat dan ahli gunungapi dalam melakukan peringatan dini kepada Pemda dan masyarakat	Pelatihan secara rutin pengamat dan ahli gunung api dalam melakukan peringatan dini kepada Pemda dan masyarakat. Serta melibatkan peran aktif masyarakat dan Pemda	DESDM	■	■	■	■
		Sedang dalam penajakan dengan DEPDAGR	Seminar nasional dan pelatihan pengurangan risiko bencana bagi para Kepala Daerah/Staf Pemda se-Indonesia	BPPT		■		
		Menyiapkan sosialisasi dan diskusi dengan daerah tentang GS dan DCSP	Menyusun materi dan agenda sosialisasi Grand Strategy dan Decentralized Conflict Sensitive Planning termasuk persiapan pelatihan kepada aparat daerah	BAPPENAS	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pembentukan SOP	Pelatihan menghadapi bencana alam	Dep. PU	■	■		
			Pelatihan Building Codes dan Control System	JICA, Dep. PU	■			
			Pelatihan seismologi, teknik kegempaan, dan mitigasi bencana	JICA, Building Research Institute, Dep. PU	■	■		
			Pelatihan strategi mitigasi bencana gempa di mega-urban	JICA, Kobe University	■			
		Pernah melakukan mengkaji Ulang, mengembangkan dan mensosialisasikan PROTAP PB di Kota Bandung  Pernah membantu pendirian dan pengembangan RUPUSDALOPS PB kota Bandung  Mengembangkan petunjuk teknis rencana tanggap darurat kota untuk bencana gempa	Melanjutkan program/kegiatan sejenis untuk membantu staf pemerintah kota-kota lain dalam mengembangkan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana	PMB-ITB, PEMKOT			■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa, pelatihan bangunan tahan gempa untuk konsultan dan kontraktor	Membantu pemerintah kota memitigasi bencana dalam memberi masukan teknis: EWS, Pelatihan-pelatihan masyarakat, Pelatihan-pelatihan peraturan bangunan tahan gempa, Pelatihan Guru utk Program Kesiapan Sekolah terhadap Bahaya Gempa, Perencanaan dan pembangunan Disaster management unit, Pelatihan pejabat/pemerintah daerah, Kerjasama dgn jaringan universitas setempat	PMB-ITB, DEPDIKNAS, Pemda Tk.1	■	■	■	■
			Seminar Manajemen Bencana untuk Pemerintah-Pemerintah Kota di Indonesia	PMB-ITB	■	■	■	■
			Lokakarya Pengembangan Kajian Risiko Kegempaan untuk Wilayah Perkotaan Indonesia	PMB-ITB			■	■
			Lokakarya Pengembangan Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana di Daerah Perkotaan	PMB-ITB			■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Peningkatan Kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana	Pengembangan dari metode yang akan diimplementasikan	PMB-ITB bekerjasama dengan Ristek	■	■	■	■
		Telah dilakukan pembuatan peta pusat gempa akibat patahan dan tumbukan lempeng, pusat gempa oleh gunung berapi, dan daerah teritorial wilayah RI, dimana daerah tersebut diatas merupakan daerah rawan bencana	Akan dilakukan sosialisasi terhadap unit-unit kerja terkait atas peta rawan bencana	DEPHUB, BMG	■	■	■	■
		Pelatihan secara rutin pengamat dan ahli gunung api dalam melakukan peringatan dini kepada DVMBG, Pemda dan masyarakat	Pelatihan secara rutin pengamat dan ahli gunung api dalam melakukan peringatan dini kepada DVMBG, Pemda dan masyarakat. Serta melibatkan peran aktif masyarakat dan Pemda	DESDM	■	■	■	■
		Kerjasama penelitian dengan Institute Nationale Geologie en Vulcanologie (INGV), Italia di bidang gunungapi	Melakukan penelitian bersama di G. Marapi, Talang, dan G. Tandikat (Sumbang) dalam rangka rencana pembentukan Kantor Regional Vulkanologi di Sumatera Barat. Pelatihan singkat di Italia dan di Indonesia	DESDM	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Pelatihan manajemen risiko bencana letusan gunung api, debris flow, dan mitigasi tanah longsor	JICA, Badan Geologi	■			
			Pelatihan manajemen informasi untuk kegiatan kelautan dan pencegahan bencana	JICA, DKP	■			
			Pelatihan Manajemen Operasi dan sistem operasi gempa bumi-tsunami dan letusan gunung api	JICA, Nagoya University, BMG, Badan Geologi, KEMENEG RISTEK	■			
			Pelatihan observasi seismologi global	JICA, Buiding Research Institute, BMG, Badan Geologi, PU, KEMENEG RISTEK	■			
			Pelatihan pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai	JICA, Hokkaido University, Dep. PU	■			
			Pelatihan SAR Kelautan dan pencegahan bencana untuk perencanaan kebijakan	JICA, Japan Coast Guard, BASARNAS	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Kerjasama dengan BGR Jerman	Pelatihan pengurangan risiko bencana di BGR, Hannover, Jerman	BPPT	■			
		Integrasi materi kesiapsiagaan bencana dan upaya pengurangan risiko dalam kurikulum pelatihan PMR dan KSR Unit Perguruan Tinggi.	Pelatihan Pelatih Inti dan fasilitator Penyebaran Risiko Bencana dari kalangan PMR Wira, KSR Markas / KSR Unit Perguruan Tinggi, SIBAT dan Satgas PMI sedikitnya di PMI Cabang rawan bencana.	PMI	■	■		
		Pelatihan manajemen teknis medis, teknis kesehatan lain dan penunjang dalam PK-MKL pada petugas kesehatan	Tetap melanjutkan Pelatihan manajemen teknis medis, teknis kesehatan lain dan penunjang dalam PK-MKL pada petugas kesehatan	DEPKES	■	■	■	
		Pelatihan manajemen PK-MKL kepada petugas kesehatan di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota, RS dan Puskesmas	Tetap melakukan Pelatihan manajemen PK-MKL kepada petugas kesehatan di Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota, RS dan Puskesmas	DEPKES	■	■	■	
		Kemampuan Direktur Rumah Sakit dalam manajemen emergency dan disaster tidak seragam	Melakukan Pelatihan HOPE ke RS	DEPKES (Yammedik)	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pelatihan MDHF (Mitigation of Disaster on Health Facility)	Tetap melakukan Pelatihan MDHF	DEPKES	■	■		
		Pelatihan teknis medis kepada dokter dan perawat	Tetap melakukan Pelatihan teknis medis kepada dokter dan perawat	DEPKES	■	■	■	■
		Pelatihan teknis sanitas, gizi, surveillans, logistik, dll bagi petugas kesehatan dan Pelatihan penunjang	Tetap melakukan Pelatihan teknis sanitas, gizi, surveillans, logistik, dll bagi petugas kesehatan dan Pelatihan penunjang	DEPKES	■	■	■	■
		Kejajakan dan Strategi Nasional PK-MKL  Pelatihan Manajemen Teknis Medis, Teknis Kesehatan lain  Penunjang dalam PK-MKL kepada petugas kesehatan di semua tingkat administrasi	Tetap melanjutkan kegiatan pelatihan manajemen, teknis medis, teknis kesehatan lain dan penunjang dalam PK-MKL	DEPKES	■	■		
		Menyusun konsep Decentralized Conflict sensitive Planning (DCSP) kerjasama dengan UNDP	Pelatihan aparat tentang DCSP	BAPPENAS	■	■		
		Pembuatan peta BKRK (Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas) dengan pendekatan partisipatif di semua desa dan kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA	Sosialisasi peta BKRK dan sharing informasi yang terkait dengan pemetaan tersebut di jajaran Pemda, dan para pemangku kepentingan lainnya.	PMI	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		<p>Pelatihan Pemetaan Daerah Rawan Bencana (Tingkat Dasar) - 3 minggu</p> <p>Pelatihan Aplikasi RS/GIS untuk Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia (SIPBI)-(Tingkat Supervisor) - 3 minggu</p> <p>Pelatihan GIS untuk "Decision Support System" Manajemen Bencana Indonesia-(Tingkat Manajer) - 5 hari</p>	<p>Pelatihan untuk menggalang dukungan dari departemen terkait dan BAPPENAS untuk perencanaan alokasi dana pusat/daerah</p>	UGM	■			
		<p>Menyusun draft silabus, modul dan buku panduan - Penyadaran kesiapsiagaan bencana dan upaya PRB melalui pendekatan pendidikan ketrampilan hidup untuk PMR Mula (SD), PMR Madia (SLTP) dan PMR Wira (SLTA) serta KSR Unit Perguruan Tinggi</p>	<p>Orientasi dan penyadaran upaya pengurangan risiko bencana bagi para pembina PMR dan pembina teknis KSR PMI Unit Perguruan Tinggi.</p>	PMI	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pelatihan guru SD seluruh Indonesia (ToT) untuk kesiapan Sekolah Menghadapi Gempa bekerjasama dengan DEPDIKNAS, 7 batch	Pelatihan guru SD seluruh Indonesia (ToT) untuk kesiapan Sekolah Menghadapi Gempa kerjasama dengan DEPDIKNAS, 2005-2010	ITB	■	■		
		Kurikulum BLS/PPGD untuk Awam Kurikulum BTLs/BCLS/PPGD untuk Perawat Kurikulum ATLS/ACLS/GELS untuk Dokter Umum Pelatihan DVI untuk Dokter, Dokter Gigi dan Forensik	Pelatihan - pelatihan bagi tenaga kesehatan	DEPKES	■	■	■	■
		Advokasi ke pimpinan daerah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pembentukan Public Safety Centre (PSC) Pembentukan dan evaluasi tenaga BSB	Pertemuan di regional atau provinsi	DEPKES (Yanmedik)	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pendidikan S2 dan S3 serta pelatihan dalam dan luar negeri untuk bidang vulkanologi dan seismologi.	Melanjutkan pendidikan sampai selesai S2 dan S3 bagi staf yang sedang belajar di Jepang dan ITB	DESDM	■	■		
			Kursus dan pelatihan kesiapsiagaan bencana teknologi/ industri/lingkungan	ITS			■	■
		Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas lokal untuk pengelolaan risiko bencana dan kerentanan	Pengembangan program pelatihan PRB dan kerentanan yang untuk LSM atau kelompok masyarakat dalam rangka pelembagaan dan penguatan kapasitas lokal	CDS-Ull bekerjasama dengan LSM lokal, nasional dan internasional	■	■	■	■
		Memberikan pelatihan keterampilan menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi dan tsunami	Pendidikan publik mulai dari pemahaman proses alam, bencana, keterampilan menyelamatkan diri di kota Bengkulu, Banten, Lampung, Pacitan, Banyuwangi, Maumere	LIPi	■			
		Melakukan identifikasi daerah, integrasi sistem ICT, karakteristik tsunamigenik dan kegempaan	Melakukan identifikasi kesiapan daerah untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan	Kementerian Negara Ristek dan LPND terkait	■		■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Masih berlangsung dari 1 lokasi ke lokasi bencana/ rawan bencana lainnya	<p>Memberikan pelatihan-pelatihan dalam konteks kesiapsiagaan bencana</p> <p>Menindaklanjuti hasil pelatihan dengan membangun sistem kesiapsiagaan bencana di dalam masyarakat di daerah rawan bencana.</p>	YTBI dan Partner-Partner lokal				
I	Meningkatkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kapasitas lokal	Adanya Kebijakan- kebijakan PMI yang memprioritaskan penguatan kapasitas PMI dalam implementasi Program Upaya Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko melalui program KBBM (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) dan PERTAMA (Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat).	<p>Advokasi, sosialisasi dan diseminasi Kebijakan- kebijakan PMI dan IFRC tentang KBBM dan PERTAMA, baik internal maupun eksternal serta mendorong inisiatif seluruh PMI Daerah dan PMI Cabang untuk melaksanakan program KBBM dan PERTAMA, utamanya di desa-desa yang sangat rawan bencana di wilayahnya.</p>	PMI				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Revisi buku dan standarisasi pelatihan KBBM, PERTAMA, Tanggap Darurat Bencana, Logistik, Penanganan Bencana, ATPA, VCA/PRA dll sesuai dengan standart PMI dan Palang Merah Internasional.	Cetak buku hasil revisi serta menggunakannya secara konsisten dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, penyadaran maupun implementasi program KBBM dan PERTAMA.	PMI	■			
		Adanya pemeitaan kapasitas SDM PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI Cabang di bidang Penanganan Bencana dan upaya pengurangan risiko (2005)  Adanya rencana kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan-refreshing maupun pelatihan-pelatihan baru bagi Pelatih Utama, serta anggota Satgas (Satuan Siaga Penanganan Bencana)	Rekrutmen dan pelatihan Satgas PMI di 30 PMI Daerah dan sedikitnya di 100 PMI Cabang  Pembentukan dan Pelatihan SIBAT di masyarakat desa / kelurahan sedikitnya di 100 PMI Cabang yang rawan bencana  Pelatihan Pelatih Utama KBBM dan PERTAMA di daerah-daerah pengembangan baru	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		PMI Pusat, Satgas PMI Daerah, Satgas PMI Cabang maupun anggota SIBAT (Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat) 2005  Pelatihan Pelatih Utama KBBM dan PERTAMA di Pusat, Daerah, Cabang dan di tingkat masyarakat (2002, 2003, 2004, 2005)	Pelatihan Upaya Mitigasi dan Upaya Pengurangan Risiko bagi Staff, Satgas dan Pengurus PMI, sedikitnya 2 kali dalam setahun di tingkat nasional, dan masing-masing 1 kali di tingkat Daerah dan Cabang  Pelatihan Pelatih Kesiapsiagaan Tanggap Darurat di 30 provinsi  Pelatihan Penyadaran Risiko Bencana bagi anggota SIBAT di semua desa / kelurahan yang memiliki program KBBM dan PERTAMA	PMI	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		<p>Pengembangan dan sosialisasi Konsep "Safe Community"</p> <p>Sosialisasi Konsep "Safe Community"</p> <p>Uji coba pelaksanaan "Safe Community" dengan membuat "Public Safety Center" (PSC)</p> <p>Pelaksanaan PSC (di beberapa daerah)</p>	<p>Melanjutkan sosialisasi Konsep "Safe Community" sehingga daerah melaksanakan "Safe Community" dengan membuat PSC</p>	DEPKES	■	■		
		<p>7 (tujuh) daerah percontohan Safe Community (masyarakat sehat dan aman)</p>	Tidak lanjut dan evaluasi	DEPKES (Yanmed)		■		
		<p>Dalam proses peninjauan dengan masyarakat pelaku pariwisata di Bali</p>	Seminar dan pelatihan kepada masyarakat pelaku pariwisata di Bali	BPPT	■			








No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		VCA, PRA dan Baseline Survey telah dilaksanakan di semua desa/kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA.	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil VCA, PRA dan Baseline Survey yang telah terhimpun dari semua desa / kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA untuk keperluan perencanaan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko di tingkat masyarakat, PMI Ranting, PMI (Cabang, PMI Daerah dan PMI Pusat Pendekatan bottom up)	PMI	■	■		
		Pelatihan dan sosialisasi tentang SKD Penyakit Menular dan SKPG	Tetap melanjutkan Pelatihan dan sosialisasi tentang SKD Penyakit Menular dan SKPG	DEPKES	■	■	■	■
		Pelatihan "Basic Life Support" (BLS) pada awam dan awam khusus	Tetap melanjutkan kegiatan Pelatihan (BLS) pada awam dan awam khusus	DEPKES	■	■	■	■
		Mengintegrasikan komponen upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dalam program CBFA (Community Based First Aid) dan Program PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Approach) - Tahun 2002 s.d sekarang.	Melaksanakan program Integrated CBRR (Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat) dengan mengembangkannya dalam penyadaran risiko dari aspek climate change serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan, livelihood dan penyadaran sosial.	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pengembangan metode mitigasi banjir berbasis masyarakat di Bandung dan Jakarta (CBFM) (2002-2004)	Pengembangan kemampuan CBDRM pada komunitas NU dan Muhammadiyah (2006-2007)	ITB	■	■		
		Pelatihan (Pelatihan) Pemetaan Daerah Rawan Bencana (Tingkat Dasar) - 3 minggu  Pelatihan Aplikasi RS/GIS untuk Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia (SIPBI)- (Tingkat Supervisor) - 3 minggu  Pelatihan GIS untuk "Decision Support System" Manajemen Bencana Indonesia-(Tingkat Manajer) - 5 hari	Pelatihan akan diselenggarakan lebih intensif dan kerjasama dengan ADPC (Asian Disaster Preparedness Center) Thailand, Bangkok.	UGM	■	■	■	
		Pelatihan DMIS di tingkat Regional dan internasional yang diselenggarakan oleh IFRC (2004).	Melatih masyarakat, Komite Desa / Kelurahan, dan SIBAT di desa / kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA dalam menggunakan alat dan tools sistem peringatan dini dengan pendekatan kearifan budaya lokal	PMI	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pelatihan guru SD seluruh Indonesia (ToT) untuk kesiapan Sekolah Menghadapi Gempa bekerjasama dengan DEPDIKNAS (IUDMP 2001-2003), DEPDIKNAS (2003-sekarang) 7 batch	Melanjutkan pelatihan program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa yang dilaksanakan setiap tahun	PMB-ITB kerjasama dengan DIKNAS	■	■	■	■
			Program sejenis dengan NU dan Muhammadiyah, 2006-2007	PMB-ITB kerjasama dengan AusAid, NU dan Muhammadiyah	■	■	■	
		Kurikulum PPGD untuk Awam Kurikulum PPGD untuk Perawat Kurikulum GELS untuk Dokter Umum Pelatihan DVI untuk Dokter, Dokter Gigi dan Forensik	Pelatihan untuk Awam, Perawat, Dokter Umum di bidang kegawat daruratan medik	DEPKES	■	■	■	■












No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Membantu dalam menguatkan social self help capacity melalui bantuan-bantuan saran dan bantuan teknis	BAKORNAS PBP dan DEPDAGRI DEPES, Dep. PU (didukung oleh BGR /GTZ melalui Georisk Project)	■			
		Pernah mengadakan pelatihan teknis tukang mengenai bangunan tahan gempa di Kota Bengkulu	Melanjutkan kegiatan pelatihan teknis Tukang Mengenai Bangunan Tahan Gempa di beberapa kota di Indonesia terutama di kota-kota rawan gempa serta mengadakan pelatihan sejenis untuk konsultan dan kontraktor	PMB-ITB, PU, PEMDA	■	■	■	■
		Pernah mengadakan pelatihan sistem pengawasan dan pengendalian bangunan untuk staf Dinas Bangunan Kota Bandung	Melanjutkan kegiatan pelatihan yang sama untuk staf Dinas Bangunan di kota-kota rawan gempa	PMB-ITB, PU, PEMKOT-PEMKOT	■	■	■	■
			Peningkatan kapasitas komunitas pengurangan risiko bencana teknologi/industri lingkungan di Kota Surabaya	ITS			■	









No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			<p>Perencanaan manajemen bencana teknologi industri/lingkungan di Jawa Timur</p> <p>Identifikasi industri berisiko tinggi</p> <p>Pemetaan kawasan rawan bencana</p> <p>Analisis biaya dan manfaat</p> <p>Pemodelan skenario terburuk</p> <p>Pemodelan struktur untuk mengurangi risiko bencana</p> <p>Pemodelan bioengineering untuk mengurangi risiko</p>	ITS				
m	Memastikan akses yang sama untuk mendapatkan pelatihan bagi kelompok rentan							

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
n	Mengembangkan metode kajian prediksi risiko bencana dan analisis biaya manfaat aksi PRB		Analisis biaya dan manfaat bencana teknologi yang telah terjadi  Analisis biaya dan manfaat bencana teknologi	ITS				
o	Penguatan kapasitas teknis dan scientific dalam penerapan metode, kajian dan model dari kemungkinan bencana geologi, iklim, dan air	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami	Survey hidrografi Sebagai data dasar pemodelan topografi dasar laut untuk mendukung TEWS	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait				
			Pengembangan sistem pemantauan bencana banjir, gunung api, dll secara on line serta penggunaan data-datanya dalam pemodelan mekanisme bencana terkait serta strategi antisipasinya di masa yang akan datang	PMB-ITB				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Kajian dan simulasi tsunami untuk masukan teknis penyusunan dan pemasangan "early warning system" di kawasan-kawasan rawan tsunami di NAD	PMB-ITB		■	■	
		Mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System /TEWS) di Indonesia	Mengintegrasikan dan mengembangkan kemampuan nasional dibidang Earthquake dan Oceanographic Monitoring serta Pemodelan dengan kemampuan nasional dibidang ICT untuk dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang tsunami, 5 menit setelah gempa terjadi	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■		■	
		Penguatan kapasitas teknis dan ilmiah melalui kerjasama dengan instansi yang terkait baik dalam maupun luar negeri	Penguatan kapasitas teknis dan scientific melalui kerjasama dengan instansi yang terkait baik dalam maupun luar negeri	LAPAN	■	■	■	■
		Pengembangan Spatial Decision Support System	Pengembangan Spatial Decision Support System			■	■	
		Penguatan kapasitas teknis dan scientific dalam penerapan metode, kajian dan model bencana geologi untuk diseminasi pada masyarakat	Implementasi akan terus dilanjutkan	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
p	Meningkatkan peran media untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana	Pada tahun 1999 pernah mengadakan pelatihan jurnalistik mengenai mitigasi bencana untuk media massa	Melanjutkan kegiatan pelatihan untuk sasaran yang lebih luas yang melibatkan media massa (TV, Radio, Cetak) dari berbagai wilayah Indonesia	PMB-ITB, KOMINFO, Media				
		Sudah dilaksanakan bersama DKP pelatihan Penanganan Bencana untuk jurnalis, konferensi pers, roadshow dan talkshow	Memperluas jaringan dan kerjasama dg media di tingkat daerah dan nasional untuk meningkatkan pemahaman melalui pelatihan	MPBI, Dep. Kominfo, BAKORNAS PB				
		Penerbitan dan penyebaran buku saku, leaflet dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah	Memaksimalkan dan menambah jumlah penyebaran buku saku, leaflet dan poster tentang bencana letusan gunung api, gempa bumi	DKP				
4	Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana							
a	Peningkatan manajemen ekosistem, pemanfaatan lahan dan aktivitas pembangunan yang baik	Usulan konservasi sumber daya air	Melakukan survei di lokasi rawan banjir dlm rangka pengelolaan sumber daya air	Dep. PU				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		<p>Teridentifikasi dan tersusunnya rencana kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang disepakati masyarakat setempat dan pihak terkait</p> <p>Tersusunnya masukan bagi penyusunan Perda tentang perencanaan lingkungan kawasan</p>	<p>Perencanaan lingkungan secara partisipatif pada kawasan rawan bencana dan kawasan rawan pembangunan</p>	KLH				
		<p>Melakukan penyelidikan terhadap kualitas air tanah di kawasan Industri di kota Semarang, yang menunjukkan tingkat pencemaran yang sangat tinggi</p>	<p>Kajian dan penyelidikan tentang kebumihan (bagaimana lapisan atas tanah bereaksi pada gempa bumi)</p>	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM				
		<p>Hingga saat ini telah dilaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) tahun 2003 dengan target seluas 300.000 ha, tahun 2004 dengan target 500.000 ha dan tahun 2005 dgn target 600.000 ha</p>	<p>Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN) akan dilaksanakan dengan sasaran 3 juta ha selama 5 th (2003-2007), tahun 2006 dengan target seluas 700.000 ha dan tahun 2007 dgn target seluas 900.000 ha</p>	DEPHUT				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Langkah pengurangan risiko bencana Manajemen lingkungan Langkah-langkah fisik dan teknis Jaringan kerjasama	UNICEF, BAKORNAS PB, DEPDAGRI, DEPKES, DEPSOS, BKKBN, Dep. PU, KEMENKO KESRA, DEPKUMHAM, Kejaksaan, POLRI, DEPPERIN, DEPDAG, DEPKOMINFO, BPS, KEMENEG PP, Pemprov dan Pemkab/ Pemkot				
			Pengembangan manajemen lingkungan untuk konservasi sumber daya alam dan energi	CDS-Ull bekerjasama dengan Prodi Teknik Lingkungan dan overseas academician/ practitioner				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penyusunan neraca sumber daya air tanah, evaluasi potensi sumber daya air tanah (pemetaan hidrogeologi)	Pengembangan tata ruang kawasan imbuhan air tanah (recharge area) untuk mengantisipasi bencana kekeringan	BPPT	■	■	■	■
		Pengembangan teknologi remediasi dan restorasi untuk lahan kritis dan marginal	Penerapan teknologi remediasi dan restorasi untuk lahan kritis dan marginal	BPPT		■	■	
		Rehabilitasi Hutan bakau paska tsunami	Penataan dan rehabilitasi kawasan hutan bakau di pulau Sabang	Oseanografi - LIP	■			
b	Penerapan pola pengelolaan SDA dan lingkungan yang baik terkait PRB	Sedang dibangun pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik terkait PRB	Penerapan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik terkait PRB	LAPAN	■	■	■	■
		Pembuatan green belt di sekitar waduk	Peningkatan dan perluasan green belt di waduk	Dep.PU	■	■	■	
		Pembangunan pengelolaan air bersih	Peningkatan kualitas air bersih	Dep.PU	■	■	■	■
		Penyiapan kegiatan (darurat) lingkungan pada daerah gambut di Kalteng (Pulang Pisau, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur) dan Kaltim (Kutai Kartanegara dan Kutai Timur) selesai Maret 2006	Proyek penyiapan kegiatan (darurat) lingkungan pada daerah gambut yang didanai dari Rencana Aksi SEA ke-4 DIPECHO	DIPECHO, KLH, BAKORNAS PB, SATKORLAK PB dan SATLAK PB, Instansi terkait lainnya	■	■	■	




No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Menerapkan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (RT/RW) dengan baik dan benar supaya tidak menimbulkan bencana banjir	Meningkatkan kapasitas para pemulung dan tukang sampah dalam rangka mengurangi sampah di daerah aliran sungai supaya tidak mengakibatkan bencana banjir	UNESCO Yayasan Kirai, masyarakat Banjarsari, Pramuka	■			
		Mendorong penegakkan hukum lingkungan untuk peredaman bencana bagi kawasan rawan bencana	Mendorong penegakkan hukum lingkungan untuk meredam bencana melalui jalur hukum	UPN Veteran Yogyakarta	■	■	■	■
		Pengembangan hutan bakau di NAD	Melakukan penanaman kembali hutan bakau	BRR	■	■		
c	Mengintegrasikan pengurangan risiko yang terkait dengan perubahan iklim	Ikut serta secara aktif dalam lokakarya, seminar, simposium, pertemuan nasional, regional dan internasional yang membahas tentang kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya pengurangan risiko	Mengintegrasikan aspek climate change dan livelihood dalam program KBBM (Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat) dan PERTAMA (Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat)	PMI	■	■	■	
d	Meningkatkan ketahanan pangan pada daerah rawan bencana terutama pada daerah berbasis pertanian							

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
e	Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam sektor kesehatan	Telah dilaksanakan pembuatan ilustrasi sistem transportasi penanganan bencana dimana sistem indikator atas daerah-daerah rawan bencana diketahui sehingga pemenuhan sarana dan prasarana minimum terhadap bandara-bandara lokasi tertentu dapat diidentifikasi	Pengembangan bandara guna pemenuhan standar operasional minimal	DEPHUB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Penguatan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah rawan bencana	Tetap melakukan Penguatan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah rawan bencana	DEPKES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Implementasi pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi wilayah rawan bencana	Tetap melakukan upaya pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi wilayah rawan bencana	DEPKES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Rapat Koordinasi lintas sektor di bidang kesehatan (TNI, Polri, PMI, LSM, dan WHO)	Tetap melanjutkan rapat koordinasi lintas instansi dalam sektor kesehatan	DEPKES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Selalu mengikutsertakan lintas sektor di bidang kesehatan pada kegiatan penyusunan pedoman, pelatihan, dan pertemuan	Tetap melanjutkan upaya selalu mengikutsertakan lintas instansi dalam sektor kesehatan pada kegiatan penyusunan pedoman, pelatihan, dan pertemuan	DEPKES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Identifikasi penggunaan air tanah dalam situasi darurat pada saat dan paska bencana	Geoteknologi LIPI	■			
		Laboratorium PBL FK-UJI, Pendidikan Jogyakarta International Hospital (JIH)	Pengembangan Problem Base Learning (PBL) untuk situasi darurat dan paska bencana	CDS-UJI bekerjasama dengan Prodi Kedokteran, JIH dan overseas acadimician/practitioner		■	■	■
f	Perlindungan dan penguatan fasilitas umum dan prasarana fisik dari risiko bencana	Telah disusun program pengembangan bandara dalam rangka penanganan bencana alam dan pembangunan daerah perbatasan tingkat nasional	Melaksanakan secara bertahap program pengembangan bandara dalam rangka penanganan bencana alam dan pembangunan daerah perbatasan tingkat nasional	DEPHUB	■	■		
			Mengidentifikasi risiko bencana di rumah sakit	BAKORNAS PBP dan DEPDAGRI DEPES, Dep. PU (didukung BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Penggunaan lahan untuk pembangunan sekolah belum secara ketat memperhatikan lahan bebas gempa	Optimalisasi pemilihan lahan bebas gempa untuk pembangunan sekolah	DEPDIKNAS	■	■	■	■
		Standar konstruksi gedung sekolah tahan gempa belum dilaksanakan secara maksimal	Semua pembangunan sekolah di daerah rawan bencana akan dipersyaratkan untuk menggunakan standar konstruksi tahan gempa	DEPDIKNAS	■	■	■	■
		Fasilitas umum transportasi darat khususnya fasilitas pelabuhan ASDP yang ada sekarang telah didesain sesuai standar dan telah di AMDAL. Khusus di daerah rawan bencana, program rehabilitasi menggunakan standar konstruksi lebih tinggi daripada umumnya	Melanjutkan program rehabilitasi fasilitas dermaga ASDP	DEPHUB	■	■	■	■
			Mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan yang aman, jalur-jalur evakuasi, penampungan dan juga pusat-pusat bantuan medis	BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, Dep. PU (didukung BGR/GTZ dgn Georisk Project)	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pada tahun 2000 mengevaluasi dan menganalisis kerentanan fisik bangunan-bangunan sekolah serta melakukan desain ulang dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat bangunan sekolah yang dipilih di kota Bandung dan Bengkulu	Studi dan Kajian mengenai Kekuatan Desain Bangunan-Bangunan Gedung SD, SMP, SMA Negeri di Indonesia terhadap bahaya seismik dan tsunami	ITB, DEPDIKNAS dan PU				
			Pembentukan tim investigasi kelayakan fasilitas umum dan prasarana fisik	CDS-UUI bekerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional				
g	Penguatan mekanisme Jaringan pengamanan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dari risiko bencana		Kredit mikro ketahanan ekonomi masyarakat pesisir	DKP				
		Program Lazis UUI untuk kaum miskin	Pengembangan program Lazis UUI untuk perlindungan kaum miskin dari risiko bencana	CDS-UUI bekerjasama dengan Lazis UUI dan Islamic Countries Funding				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan		
					2006	2007	2008 - 2009
h	Memasukkan upaya PRB dalam proses pemulihan paska bencana		Melakukan pembangunan kembali wilayah bencana di NAD dan Nias dengan mempertimbangkan PRB	BRR			
i	Memastikan program penanganan pengungsi tidak meningkatkan risiko dan kerentanan	Distribusi bantuan metode "Buffer Stock" untuk beras 50 ton di tiap provinsi, lauk pauk, sandang, sarana kebutuhan dasar darurat untuk tidur dan penampungan sementara  Untuk Mie Instant telah dilakukan sistem distribusi dengan "Delivery Order"	Memperbaiki isi dan mutu bantuan melalui seleksi kebutuhan yang ketat  Meningkatkan mutu kemasan  Melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai nominal ekonomis utnuk bantuan-bantuan fisik dan non fisik	DEP.SOS			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Tidak adanya identitas, logo pada setiap isi barang bantuan yang dapat dimanfaatkan kepemilikannya oleh pihak lain (bukan bantuan dari DEPSOS)	Melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai nominal ekonomis utnuk bantuan-bantuan fisik dan non fisik	DEPSOS	■			
		Seiring meningkatnya tingkat kebutuhan korban bencana, beberapa indeks nominal bantuan perlu disesuaikan seperti kebutuhan social therapy dan psycho-social	Merancang kembali metode bantuan untuk social therapy, psycho social dan referral					
j	Mengembangkan diversifikasi mata pencaharian masyarakat di daerah berisiko tinggi	Pengembangan entrepreneurial skill dan mentoring Bisnis Mikro yang telah dikembangkan oleh PPM (FE-UII)	Program pelatihan dan mentoring entrepreneur bisnis mikro, berbasis ekonomi lokal dan akuntabilitas	CDS-UII bekerjasama dengan PPM, PPA, PPE, Lazis UII dan Islamic Countries Funding	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Sosialisasi pemahaman proses alam, bencana alam dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	Rencana pendidikan masyarakat, lingkungan sekolah dalam pemahaman proses alam, bencana alam dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di Bengkulu, Banten, Lampung, Pacitan-Banyuwangi, Maumere	LIPI		■		
		Memberikan pendidikan kepada masyarakat dan lingkungan sekolah di kawasan yang sudah terkena bencana	Rencana pendidikan masyarakat, lingkungan sekolah di Aceh, Pangandaran, Yogyakarta dan Maumere	LIPI		■		
k	Mengembangkan mekanisme penggantian kerugian akibat bencana (asuransi)	Pengembangan Baitul Mal Wattanwil (BMT) FE-Ull	Pengembangan produk takaful bencana nasional dan regional berorientasi pada pemuliaan akhlaq dan watak saling tolong menolong	CDS-Ull bekerjasama dengan BMT, Lazis Ull dan Islamic Countries Funding		■	■	■
l	Meningkatkan kemitraan masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pengurangan risiko bencana	Kerjasama dengan swasta yang telah terjalin akan dikembangkan menjadi program kampanye pengurangan risiko bencana	Program Inisiasi Green Company Program Inisiasi Komunikasi pemasaran untuk tujuan kampanye pengurangan risiko bencana Program inisiasi marketing society	CDS-Ull bekerjasama dengan Dir. PK-Ull, Gugus pemasaran, Swasta Nasional dan		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
m	Membentuk atau mengembangkan kelembagaan finansial untuk menghadapi risiko bencana	Dana alokasi khusus penanganan bencana belum ada	Mempelajari kemungkinan adanya alokasi khusus untuk penanganan bencana  Mencari mitra/donor dalam rangka penyusunan konsep Penanganan Bencana akibat konflik sosial di Indonesia	BAPPENAS	■	■		
		Mengupayakan sharing budget untuk implementasi program KBBM dan PERTAMA di desa/kelurahan di area pilot program	Pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan fund raising untuk menjaga kesinambungan program KBBM dan PERTAMA yang telah berjalan secara mandiri	PMI	■	■	■	■
		BMT, Lazis dan Dir. PK UJI diharapkan menjalin sinergi untuk pengembangan kelembagaan finansial untuk menghadapi risiko bencana	Membentuk konsorsium lembaga keuangan yang didukung oleh lembaga keuangan dan perbankan nasional maupun internasional	CDS-UJI bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, Lazis UJI, Dir. PK dan Islamic Countries Funding	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
n	Memasukkan PRB dalam perencanaan kota dan permukiman	Pembangunan penataan permukiman dan FASOS-FASUM	Peningkatan FASOS-FASUM dan permukiman sehat	Dep. PU	■	■	■	■
		Terlibat aktif dalam upaya-upaya relokasi dan pemukiman kembali masyarakat korban bencana alam	Mendorong adanya komitmen bersama dalam menata pemukiman yang berbasis pada penyadaran PRB	PMI	■	■	■	■
		Kota Semarang bagian barat daya menghadapi ancaman bahaya longsor sementara Pemda menentukan wilayah itu sebagai pengembangan kota baru	Meyakinkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan setempat untuk menata kembali daerah yang rawan bencana tersaebut	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM	■	■	■	■
		Kajian Cepat Risiko (RRA) dan rekomendasi strategi mitigasi bencana gempa untuk Palu, Bengkulu, Manado, Denpasar	Pengembangan Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi untuk Meningkatkan Kesiapan Kota Menghadapi Bencana	PMB-ITB, Pemda, KEMENEG RISTEK	■	■	■	■
		CDTI-FTSP yang berkompeten dalam bidang planologi	Keterlibatan aktif dalam pembuatan rencana tata ruang perkotaan dan permukiman	CDS-Ull bekerjasama dengan CDTI-FTSP, Dep. PU	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			<p>Pengendalian pengembangan perumahan dalam penerapan bahan bangunan dan konstruksi tahan bencana</p> <p>Studi kelayakan pembangunan baru pada wilayah/lokasi rawan bencana atau pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pembangunan baru pada lokasi rawan bencana</p>	UNHAS, FT-ARSI/PWK				
o	Pengutamaan PRB dalam prosedur perencanaan proyek infrastruktur utama	Telah dilaksanakan studi pengembangan bandara pada daerah rawan bencana	Secara bertahap akan dilakukan pelaksanaan pada pembangunan bandara di daerah rawan bencana	DEPHUB				
		Pedoman bangunan sederhana tahan gempa (IUDMP 2000)	Penyusunan pedoman bangunan tahan gempa	ITB				
		Standarisasi bangunan	Sosialisasi standar bangunan	Dep. PU				
		Pembangunan bangunan Sabo	Peningkatan dan perluasan bangunan sabo	Dep. PU				









No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Dalam rangka pengutamaan PRB dalam perencanaan proyek infrastruktur utama, Ditjen Darat telah melaksanakan AMDAL. Struktur didesain mampu meredam gempa dan dalam keadaan daktail (elastis penuh) dan tidak roboh	Akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia	DEPHUB	■	■	■	■
		Pengkajian kesiapan teknis atas penemuan kembali daerah-daerah rawan bencana	Akan dilakukan kajian atau evaluasi teknis terhadap prasarana bandar udara	DEPHUB	■	■	■	
		Integrasi kegiatan DRM/PRB ke dalam perencanaan proyek konstruksi perumahan dan infrastruktur	Meninjau kembali dari kode pembangunan Penggabungan dari DRM/ PRB ke dalam kegiatan masyarakat Kepekaan dari para pengambil keputusan di desa, Kecamatan dan Kabupaten (Aceh kota, Aceh Besar, Pidie)	GTZ-SLGSR (program local pemerintahan) bekerjasama dengan BGR dan KfW	■	■		
			Informasi dari pengambil keputusan di tingkat provinsi					

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Riset dan implementasi hasil riset CEEDEDS pada bidang kegempaan dan kontruksi bangunan tahan gempa dan bahaya gunung Merapi	Penyusunan standar kontruksi bangunan tahan gempa dan bahaya gunung berapi	CDS-UII bekerjasama dengan CEEDEDS, Lembaga Nasional dan Internasional				
p	Mengembangkan pedoman dan sarana monitoring dalam konteks kebijakan tata guna lahan	Tindak lanjut Penyusunan Disaster Plan di seluruh Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi	DEPKES (Yanmed)				
		Adanya PPK sebagai unit eselon 2 yang bertugas	Tetap melanjutkan pembuatan pedoman, protap, standar, MOU, dll	DEPKES				
		Penilaian kembali Protap dan Pedoman yang sudah ada	Melanjutkan penilaian kembali Protap dan Pedoman	DEPKES				
			Akan dibuat konsep tentang SOP PK-MKL yang melibatkan semua pihak (DEPKES, TNI, POLRI, Profesi, dll)	DEPKES				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Membantu pembuatan panduan rencana tata ruang dan building codes di tingkat nasional	BAKORNAS PB dan DEPDIAGRRI DEPKES, Dep. PU (BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■	■	■	■
q	Memasukkan PRB dalam perencanaan pembangunan wilayah (pegunungan, dataran dan wilayah pantai)	CDTI-FTSP yang berkompeten dalam bidang planologi	Menyusun pedoman perencanaan dan pembangunan wilayah pegunungan, dataran banjir dan wilayah pantai	CDS-Ull bekerjasama dengan CDTI-FTSP, overseas academician/practitioners	■	■	■	■
r	Merevisi aturan dan standar pendirian bangunan	Survei dan pengumpulan data bencana	Perencanaan perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Dep. PU	■	■	■	■
		Membentuk SOP penanganan bencana dan penyediaan data kebencanaan	Menyusun SOP penanganan bencana dan penyediaan data kebencanaan dgn mengaktifkan sumber daya di daerah dim penanganan bencana geologi sesuai dengan bimbingan melalui penerbitan SNI/Penanggulangan bencana geologi	DESDM	■	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Mendominasinya bentuk bangunan ruko pada kawasan perkotaan tanpa memperhatikan peruntukan lahan	Menyusun dan merevisi aturan tentang tata ruang sesuai dengan konsep mitigasi bencana  Pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar penataan ruang	UNHAS, FT- ARSI/PWK				
5	Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat							
a	Penguatan kebijakan, teknis dan kapasitas kelembagaan penangan bencana pada tingkat lokal, regional dan nasional	Pembuatan Pedoman Penilaian Risiko Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota (2001), Pedoman Peta Geomedik dan Sosialisasi Pedoman-Pedoman yang disusun  Jejarung rujukan SPGDT Tim DVI	Melanjutkan sosialisasi Pedoman Penilaian Risiko Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar daerah melakukan kegiatan penilaian risiko dan pembuatan peta geomedik  Pengembangan Call Center, ambulance transportasi dan gawat darurat, serta alat komunikasi dan informasi	DEPKES				
		Masih banyak bandara-bandara termasuk yang berdekatan dengan lokasi rawan bencana belum memiliki standar fasilitas minimum bandara yang dapat mengakomodir keperluan tanggap darurat bencana	Bandara dgn jarak tidak lebih dari 500 km dari bandara hub atau tidak lebih dari 250 km dari lokasi bencana harus memenuhi fasilitas minimum bandara untuk operasi pesawat jenis C-130 dan F-27	DEPHUB				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Program-program pembangunan serta pengembangan prasarana minimal untuk mengurangi faktor-faktor risiko bencana	DEPHUB	■	■	■	■
		Pengembangan Brigade Siaga Bencana di Provinsi (Dokter PTT BSB ada di 28 RS di 21 Provinsi)	Pengembangan BSB di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota	DEPKES	■	■	■	
		Telah disusun program penanganan bencana alam dan pembangunan daerah perbatasan tingkat nasional	Program pengembangan transportasi diarahkan pada daerah-daerah di Indonesia yang rawan bencana	DEPHUB	■	■	■	■
		DKP tahun 2005 menyusun Pedoman Umum Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir	Revisi pedoman mitigasi bencana di wilayah pesisir	DKP		■		
		Meningkatnya kesiapsiagaan PMI melalui revisi, pembaruan, dan pengembangan materi-materi kebijakan penanganan bencana/konflik yang menyeluruh, sesuai rencana dan mandat yang diberikan pemerintah Indonesia	Pengembangan kapasitas organisasi PMI di semua tingkatan (PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI Cabang) di bidang penanganan bencana.	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Terbentuknya jejaring rujukan medik	Pembinaan oleh Pusat dan Regional ke daerah binaan Pengadaan peralatan standar untuk bencana dan DVI di regional dan pusat	DEPKES				
		Tersedianya dana bagi program KBBM dan PERTAMA dari IFRC, PNSs dan donor internasional  Tersedianya dukungan logistik tanggap darurat dan bantuan korban bencana di 2 Gudang Sentral (Jakarta dan Surabaya), 5 Gudang Regional (Banda Aceh, Medan, Padang, Bali dan Makassar) serta emergency storage di Markas Daerah PMI se Indonesia sesuai standart Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.  Tersedianya DMIS (Sistem Informasi Manajemen Bencana) di PMI dan telah berfungsi dengan baik	Membangun dan memperluas gudang-gudang logistik yang ada serta mengembangkan gudang sentral di Surabaya dan Jakarta, dan pembangunan gudang regional di Manado, Biak dan Palembang), termasuk pengadaan kelengkapan logistik dan bantuan relief (restok) dengan kapasitas minimal 10.000 KK per gudang.	PMI				




No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pengadaan perangkat software dan hardware Sistem Peringatan Dini	Implementasi kerja sama dengan Palang Merah Perancis untuk mendukung terbentuknya National Center, Operation Center dan Emergency Call Centers untuk sistem peringatan dini di DKI, NAD, Sumbang, Bali, Yogya dan Jambi	PMI, BAKORNAS PB	■	■		
		Pelatihan DMIS di tingkat Regional dan internasional yang diselenggarakan oleh IFRC (2004).	Meningkatkan kapasitas staff dan Satgana dalam upaya-upaya pemberian informasi darurat bencana dan peringatan dini berbasis masyarakat	PMI	■	■	■	■
		Simulasi dan gladi kesiapsiagaan, dan upaya pengurangan risiko bencana di Pesisir Selatan, Bone, Wajo, Polewali, Lampung Barat dan Lampung Selatan.	Memberdayakan kapasitas masyarakat desa/keurahan area pilot program KBMM dan PERTAMA melalui gladi dan simulasi kesiapsiagaan tanggap darurat bencana	PMI	■	■	■	
		Jejaring Rujukan Medik Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Program Safe Community (SC) Terbentuknya Tim SPGDT dan DVI di 4 regional	Monitoring, evaluasi dan pembinaan	DEPKES	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Menyusun Pedoman Penanggulangan Bencana gunung berapi	Membuat prosedur tetap dalam menangani bencana letusan gunung berapi	DESDM	■			
		Diperlukan adanya penguatan kebijakan, teknis dan kapasitas kelembagaan penanganan bencana pada tingkat lokal, regional dan nasional yang menyeluruh	Perancangan pelatihan biro untuk BAKORNAS PB dan anggotanya  Menentukan status otoritas koordinasi bencana SATKORLAK/ SATLAK	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	
b	Mengembangkan dialog, pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga terkait kebencanaan	Pengumpulan, pembaharuan dan penyebaran informasi mengenai situasi dan respon pada saat bencana alam terjadi	Pengumpulan, pembaharuan dan penyebaran informasi mengenai situasi dan respon pada saat bencana alam terjadi	OCHA	■	■		
			Koordinasi pengembangan peringatan dini multi-hazard	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait		■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
c	Mengembangkan pendekatan regional dlm merumuskan kebijakan, mekanisme operasi dan sistem komunikasi dalam tanggap darurat bencana	Pembentukan Tim Satuan Tugas Pekerjaan Umum (SATGAS PU) Penanganan Bencana Alam di Pusat	Sosialisasi ke Tim Satuan Tugas Pekerjaan Umum (SATGAS) PU Penanganan Bencana Alam Provinsi/ Kabupaten/Kota	Dep. PU	■	■	■	
		Distribusi evakuasi kit telah menjangkau 61 Kab/Kota meliputi 6 jenis (item) yaitu: Tenda Peleton, Tenda, Velbed, Alat dapur lapangan, Perahu Karet, Rompi Pelampung  Setiap Provinsi telah mendapat bantuan alat komunikasi radio VHF, HF lengkap untuk mendukung operasional Posko PB yang ada di setiap Dinas Sosial Provinsi se-Indonesia  Sejak otonomi daerah seluruh aset mobilisasi yang ada di eks kanwil DEPSOS telah ditarik menjadi milik Pemda Provinsi	Memperluas jangkauan distribusi paket evaluasi kit  Menyiapkan sarana atau unit transportasi taktis PB untuk setiap provinsi seluruh Indonesia terdiri dari : 1 Unit Mobil Dumlap, 1 Unit Truk Angkutan Barang, 1 Unit Mobil Rescue, 1 Unit Mobil Rescue, 1 Unit Mobil Posko Lapangan yang berfungsi untuk Komunikasi dan Penyuluhan , 1 Unit Mobil Ambulance dan 2 Unit Sepeda Motor Trail	DEPSOS	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan		
					2006	2007	2008
d	Pengkajian ulang dan pembaharuan rencana kesiapan bencana dan rencana kontijensi	Pengumpulan data dasar kesiapsiagaan dan sumber daya dalam Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain	Melanjutkan pengumpulan data dasar kesiapsiagaan dan sumber daya dalam PK-MKL	DEPKES	■	■	
			Contingency Planning Gunung Semeru	ITS, MPBI dan Dewan Pakar	■		
		Mendukung BAKORNAS dalam penguatan kapasitas daerah, khususnya daerah rawan bencana dengan melaksanakan Lokakarya Manajemen Kedaruratan dan perencanaan kontinjensi di Provinsi Sumbang	Review dan evaluasi kegiatan, modul, mekanisme pelaksanaan Melihat kemungkinan ke depan untuk melanjutkan pelatihan yang sama ke provinsi rawan bencana lainnya..	WFP dan anggota UNTWG lainnya, BAKORNAS PB	■	■	
		Emergency drill pelatihan dikombinasikan dengan contingency planning telah dilakukan di kota Ende	Replikasi emergency drill dan contingency planning di kota Kupang dan kecamatan-kecamatan di Lombok (NTB)	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM	■	■	
		Lokakarya Protap Penanggulangan Bencana kabupaten Badung-Bali	Kajian terhadap protap Penanggulangan Bencana dan Table Top Simulation.	LIPI-Pemerintah Kabupaten Badung	■		

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
e	Mendorong penyediaan dana darurat penanganan bencana	Alokasi dana bencana untuk penanganan bencana di tingkat pusat (mulai 2001)  Alokasi dana bencana untuk penanganan jika terjadi bencana di tingkat pusat (mulai 2005)	Mengupayakan alokasi dana di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk penanganan bencana yang bertanggung-jawabannya tidak menggunakan prosedur rutin  Mengupayakan alokasi dana bencana tidak hanya untuk penanganan jika terjadi tetapi juga untuk upaya kesiapsiagaan  Penyediaan dana untuk kegawatdaruratan medik  Penyediaan dana darurat penanganan bencana	DEPKES	■	■	■	■
				DEPKES	■	■	■	■
		Disediakan dana darurat penanganan bencana		LAPAN	■	■	■	■
		Adanya dana darurat bencana di PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI Cabang yang untuk operasi tanggap darurat bencana	Penyediaan kembali dana darurat bencana di PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI Cabang sedikinya 25% dari total anggaran tahunan  Mengembangkan dan melaksanakan panduan mitigasi bencana lokal, contingency planning dan emergency drills untuk meningkatkan kemampuan penanganan bencana masyarakat dan swasta	PMI	■	■	■	■
				BAKORNAS PB dan DEPDAGRI, DEPKES, Dep. PU (didukung oleh BGR/GTZ melalui Georisk Project)	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	
		<p>Tersedianya dana bagi program KBBM dan PERTAMA dari IFRC, PNSs dan donor internasional</p> <p>Tersedianya dukungan logistik tanggap darurat dan logistik untuk bantuan kepada korban bencana di 2 Gudang Sentral (Jakarta dan Surabaya), 5 Gudang Regional (Banda Aceh, Medan, Padang, Bali dan Makasar) serta emergency storage di Markas Daerah PMI se Indonesia sesuai standart Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.</p>	<p>Penyediaan dana di PMI Pusat, Daerah dan Cabang untuk program KBBM dan PERTAMA, khususnya implementasi nyata upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko</p> <p>Pengalokasian dana yang telah diperoleh IFRC, ICRC, PNSs dan donor internasional untuk implementasi program sesuai dengan kebutuhan, termasuk upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko</p> <p>Penyediaan fasilitas, perlengkapan dan logistik untuk implementasi program</p> <p>Penyediaan alat dan media KIE untuk Disaster Risk Awareness</p>	PMI				

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			Memperkenalkan gagasan pengasuriansi daerah yang rawan bencana, di mana anggaran tahunan daerah akan disisihkan beberapa persen dari total RAPBD, sehingga daerah mempunyai alokasi dana untuk emergency	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi / DESDM	■	■	■	
		Oxfam akan melakukan peninjauan segera setelah terjadi bencana berskala sedang dan besar.  Bila dibutuhkan - Oxfam akan menyediakan bantuan kemanusiaan dalam bidang kesehatan masyarakat (public health) yang sesuai dengan SPHERE Minimum Standard.	Pasokan air bersih: Menyediakan pasokan air bersih sesuai dengan SPHERE minimum standard. Sanitasi - menyediakan sarana sanitasi yang sesuai dengan SPHERE minimum standard. Promosi kebersihan dan kesehatan umum - bantuan non-pangan, sarana kebersihan (sabun, pasta gigi, pembalut wanita dll) termasuk alat penampung air, kelambu, serta alat masak/makan  Penyediaan penampungan sementara - keamanan pangan, termasuk bantuan tunai (cash for work) bila perlu.	Oxfam Emergency Response Team kerjasama dengan LSM lokal dan instansi pemerintah terkait	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
f	Pengembangan mekanisme khusus untuk meningkatkan partisipasi semua pihak terkait	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan evacuation route dan evacuation place untuk bencana tsunami</p> <p>Melaksanakan secara rutin lokakarya/rakor/raker tingkat nasional bagi penanggungjawab penanganan bencana PMI Daerah dan Cabang.</p> <p>Memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat dalam menyusun rencana aksi nyata dalam upaya-upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko bagian yang tidak terpisahkan dalam memperkuat kapasitas tanggap darurat bencana di semua Desa dan kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA.</p>	<p>Pelaksanaan simulasi evacuation route dan evacuation place untuk bencana tsunami di 3 kota.</p> <p>Memobilisasi dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko secara mandiri serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi nyata tanggap darurat bencana di semua Desa dan kelurahan area pilot program KBBM dan PERTAMA sesuai dengan karakteristik bahaya, kerentanan dan risiko dampak bencana.</p>	KEMENEG RISTEK dan LPND terkait	■	■	■	■
				PMI	■	■	■	

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Melaksanakan advokasi dan promosi prinsip, strategi, mandat, dan kebijakan, pelayanan PB dalam rangka mengembangkan dan menjaga kerjasama dengan Perhimpunan Nasional, pemerintah, IFRC, ICRC, Internasional NGOs, departemen, Dinas, Lembaga dan stakeholder lainnya di lingkup nasional.	Peningkatan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam penyebarluasan informasi manajemen bencana secara internal dan serta secara eksternal, Nasional (Pemerintah, Departemen/ Dinas / lembaga terkait) maupun internasional (IFRC, PNSS dan ICRC	PMI	■	■	■	■
		Program KBBM dan PERTAMA yang telah dilaksanakan di 8 Provinsi (Sulsel, Sulbar, Sumbang, Lampung, Kalsel, Sumut, Aceh, DKI Jakarta) diintegrasikan secara terpadu dalam rencana induk pembangunan lokal	Memperluas implementasi program KBBM dan PERTAMA dengan penambahan 15 provinsi yang baru, diantaranya Papua, dan NTT	PMI	■	■	■	■
		Simulasi dan gladi kesiapsiagaan, dan upaya pengurangan risiko bencana di Pesisir Selatan, Bone, Wajo, Polewali, Lampung Barat dan Lampung Selatan.	Menyelenggarakan gladi Penanganan Bencana Nasional serta Temu Bakti Satgana dan SIBAT Tingkat Nasional secara rutin setiap tahun.	PMI	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Pendekatan Community based disaster risk management (CBDRM) sedang berjalan dan masih harus disesuaikan dengan situasi setempat.	Melaksanakan lokakarya CBDRM yang direncanakan di kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Bireuen.	BGR/Badan Geologi/ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD	■	■		
			Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri  Meningkatkan partisipasi masyarakat rawan bencana pada pengambilan keputusan dan perencanaan tata ruang di kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana  Meningkatkan posisi masyarakat yang berdaya	BGR/GTZ (Georisk Project) - Badan Geologi/ DESDM	■	■	■	■

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
			<p>Meningkatkan jejaring sosial lokal yang ada</p> <p>Menjamin pendapatan dan membuat masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana merasa aman</p> <p>Meluaskan visi yang lebih dalam menghadapi bencana alam</p> <p>Membangun kapasitas nasional dalam penanganan bencana berdasarkan servis yang disertifikasi dan diaudit oleh industri konsultan, universitas dan institusi penelitian lainnya</p>		■	■	■	■
	Pengembangan metode mitigasi bencana banjir berbasis masyarakat di Jakarta (CBFM) (2003 - 2005)		<p>Replikasi kegiatan berbasis masyarakat di area lain di Jakarta dan sosialisasi kegiatan pada tingkat Pemerintah DKI Jakarta</p>	UNESCO, ITB, LSM Lokal (PPMA), SATKORLAK PB	■			

No	Program/Kegiatan Prioritas	Status Saat Ini	Rencana Kegiatan	Instansi	Waktu Pelaksanaan			
					2006	2007	2008	2009
		Berkoordinasi dengan pemerintah dalam penentuan setiap wilayah kegiatan IRI, termasuk mempertimbangkan daerah rawan bencana.	Meningkatkan mekanisme komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait di semua tingkatan dan secara proaktif mencari perkembangan informasi terkini tentang penanggulangan bencana	Islamic Relief Indonesia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Manajemen dampak risiko Pengkajian situasi lapangan  Penyebaran informasi laporan pengkajian situasi lapangan yang tepat waktu dan akurat  Fasilitas penyaluran bantuan darurat untuk bencana alam	Manajemen dampak risiko Pengkajian situasi lapangan  Penyebaran informasi laporan pengkajian situasi lapangan yang tepat waktu dan akurat  Fasilitas penyaluran bantuan darurat untuk bencana alam	OCHA, BAKORNAS PB, SATKORLAK PB, SATLAK PB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Rencana	Rekomendasi dim rangka pengembangan formulasi dan perbaikan strategi tanggap darurat bencana	PMB - ITB, Pemda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Task force pada setiap kelompok kegiatan berperan sebagai project management	Pembentukan Koordinator sebagai subordinat Task Force dengan peran yang sama	CDS - UII manajemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

